

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA ALOKASI
UMUM DANA ALOKASI KHUSUS BELANJA MODAL
TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN
HUBUNGANNYA DENGAN KEMISKINAN DI JAWA
TENGAH TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh

SYAFIRA JULIA RIZQY

NIM: 40122041

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA ALOKASI
UMUM DANA ALOKASI KHUSUS BELANJA MODAL
TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN
HUBUNGANNYA DENGAN KEMISKINAN DI JAWA
TENGAH TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh

SYAFIRA JULIA RIZQY

NIM: 40122041

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafira Julia Rizqy

NIM : 40122041

Judul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Hubungannya Dengan Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2021-2024.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 April 2026

Yang Menyatakan,



Syafira Julia Rizqy

NIM. 40122041

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Syafira Julia Rizqy

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Syafira Julia Rizqy

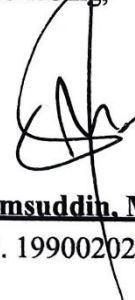
NIM : 40122041

Judul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Hubungannya Dengan Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2021-2024.**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 21 April 2026
Pembimbing,



Syamsuddin. M.Si.
NIP. 19900202201903101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Syafira Julia Rizqy

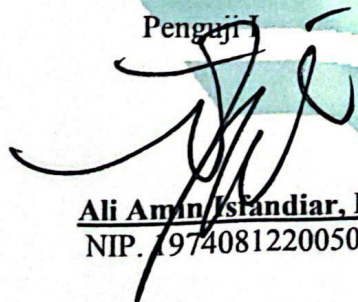
NIM : 40122041

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Hubungannya Dengan Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2021-2024.

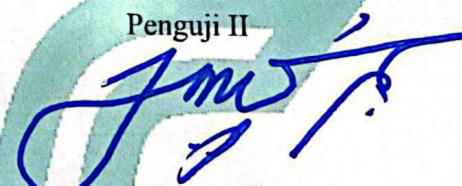
Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Dewan Penguji

Penguji I


Ali Amin Isfandiari, M.Ag.
NIP. 197408122005011002

Penguji II


Imahda Khoiri Furqon, M.Si.
NIP. 198312252019031004

Pekalongan, 25 Mei 2026

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. A.M. Muhsin Khafidz Ma'shum, M.Ag.
NIP. 197806162003121003

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *Fa inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra*”
(QS. Al-insyirah 94:5-6)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa. Angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya.

Rayakan perasaanmu sebagai manusia”

- *Baskara Putra, Hindia*

“Pada akhirnya , ini semua hanyalah permulaan”

- *Nadin Amizah*

“Diatas Sang Maha Daya semua kendali terambil alih,
jalanmu kan sepanjang niatmu, buka lagi visimu, kau tau mana urutan satu”

- *Perunggu*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana S.E di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterlibatan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Haryanto atas segala kerja keras dan pengorbanan yang menjadi kekuatan terbesar setiap langkah penulis. Ibu Mufrodah atas segala dukungan, doa yang dipanjatkan, dan kasih sayang tiada henti menjadi alasan penulis tetap bertahan sejauh ini. Terima kasih atas segala usaha dan perjuangan yang diberikan demi pendidikan dan masa depan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang kepada Bapak & Ibu serta selalu berada dalam lindungan-Nya.
2. Almamater saya Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Syamsuddin, M.Si dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih atas setiap waktu, tenaga, dan kesabaran yang telah diberikan dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan karya ini.
4. Dosen Wali Akademik, Bapak Ali Amin Isfandiar, M.Ag dengan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

5. Sahabat terkasih Nanda dan Nafa yang selalu hadir saat segalanya terasa berat dan penuh keraguan, terimakasih atas waktu, perhatian, bantuan, serta motivasi yang diberikan, baik di saat penulis merasa bersemangat maupun ketika menghadapi berbagai kesulitan. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman komunitas GenBI (penerima beasiswa Bank Indonesia angkatan 2025-2026), terima kasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis, memberikan arti kebersamaan dan menemani proses penyusunan skripsi penulis.
7. Teman-teman Divisi Infokom HMPS Ekonomi Syariah Tahun 2023 dan 2024 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan selama masa perkuliahan, terima kasih atas dukungan, bantuan, dan doa-doa baik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kopi Kenangan yang telah menjadi tempat ternyaman selama proses penyusunan skripsi. Suasana yang dingin dan nyaman memberikan ruang bagi penulis untuk belajar, berpikir, mengolah data, serta menyelesaikan setiap bagian dari penelitian ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis dan menjadi saksi bisu atas setiap proses, usaha, serta perjuangan yang mengiringi penyelesaian skripsi ini.
9. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri telah bertahan sejauh ini, melewati lelah, ragu, dan berbagai proses yang tidak mudah. Tidak semua hari berjalan sesuai rencana, tidak semua usaha langsung membuahkan hasil, namun penulis memilih untuk tidak menyerah. Semua air mata, perjuangan, dan usaha yang mungkin tidak dilihat orang lain ternyata mampu dilewati oleh penulis.

ABSTRAK

RIZQY. SYAFIRA JULIA. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Hubungannya Dengan Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2021-2024.

Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan merupakan dua indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah, yang tidak terlepas dari peran kebijakan fiskal pemerintah daerah. Pengelolaan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi permasalahan, adanya keterbatasan dalam pemanfaatan secara optimal potensi ekonomi daerah, yang tercermin dari masih relatif tingginya tingkat kemiskinan serta kuatnya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, sehingga menjadi relevan dan penting untuk dikaji lebih mendalam dalam suatu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021–2024.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari BPS dan DJPK kemenkeu. jenis data penelitian yaitu data panel dengan times series durasi 4 tahun dan cross section pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan variabel independent dalam penelitian ini meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal. Variabel korelasi dalam penelitian itu Kemiskinan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model terpilih berupa Fixed Effect Model (FEM), yang diolah menggunakan perangkat lunak Eviews 13. Analisis data meliputi uji chow, uji hausman, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji korelasi rank spearman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan nilai signifikansi masing-masing 0,0000 dan 0,0004, sedangkan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan nilai signifikansi 0,0004. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan nilai signifikansi 0.1079. Hasil temuan menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, Belanja Modal secara bersama-sama mempengaruhi PDRB di Jawa Tengah. Hasil penelitian hubungan PDRB dengan kemiskinan menunjukkan korelasi yang sangat lemah dan berarah negatif sesuai dengan kriteria tingkat korelasi rank spearman.

Kata Kunci: PAD; DAU; DAK; Belanja Modal; Kemiskinan; PDRB

ABSTRACT

RIZQY, SYAFIRA JULIA. The Impact of Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Capital Expenditures on Regional Gross Domestic Product and Their Relationship to Poverty in Central Java, 2021–2024.

Economic growth and poverty alleviation are two key indicators for assessing the success of regional development, which are inextricably linked to the role of local government fiscal policy. The management of PAD, DAU, DAK, and capital expenditures plays a crucial role in driving regional economic growth and reducing poverty rates. Regional economic development in Central Java Province still faces challenges, including limitations in the optimal utilization of regional economic potential, as reflected in the still relatively high poverty rate and the strong fiscal dependence of local governments on transfers from the central government; thus, it is relevant and important to conduct a more in-depth study on this matter. This study aims to analyze the influence of PAD, DAU, DAK, and Capital Expenditures on PDRB and their relationship with poverty rates in Central Java Province for the years 2021–2024.

This study adopts a quantitative approach using secondary data sourced from the BPS and the DJPK of the Ministry of Finance. The data types used in this study are panel data with a 4-year time series and a cross-section across 35 regencies/cities in Central Java. The dependent variable in this study is Regional Gross Domestic Product, while the independent variables include General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Local Original Revenue, and Capital Expenditures. The correlation variable in this study is Poverty. The analysis technique used is panel data regression with the selected model being the Fixed Effects Model (FEM), processed using Eviews 13 software. Data analysis includes the Chow test, the Hausman test, tests of classical assumptions, hypothesis testing, and the Spearman rank correlation test.

The results of the study indicate that, in part, the General Allocation Fund and Capital Expenditures have a significant positive effect on Regional Gross Domestic Product, with significance values of 0.0000 and 0.0004, respectively, while the Special Allocation Fund has a significant negative effect on Regional Gross Domestic Product with a significance value of 0.0004. Meanwhile, Local Own-Source Revenue has no significant effect on Regional Gross Domestic Product with a significance value of 0.1079. The findings indicate that the PAD, DAU, DAK, and Capital Expenditures collectively influence PDRB in Central Java. The results of the study on the relationship between PDRB and poverty show a very weak and negative correlation in accordance with the criteria of the Spearman rank correlation coefficient.

Keywords: local revenue; general allocation fund; special allocation fund; capital expenditure; poverty; regional gross domestic product.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Hubungannya dengan Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2021-2024.” Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Kwat Ismanto, M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Aris Safi'I, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Syamsuddin, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ali Amin Isfandiar, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) dan Dosen Penguji I sidang munaqosah.
7. Bapak Imahda Khoiri Furqon, M.Si. selaku Dosen Penguji II sidang munaqosah.
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 21 April 2026



Syafira Julia Rizqy

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat	14
D. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Landasan Teori.....	19

B.	Telaah Pustaka	37
C.	Kerangka Berpikir	48
D.	Hipotesis	49
BAB III METODE PENELITIAN		57
A.	Jenis Penelitian	57
B.	Pendekatan Penelitian	57
C.	Setting Penelitian	58
D.	Populasi dan Sampel	58
E.	Variabel Penelitian	58
F.	Teknik Pengumpulan Data	60
G.	Metode Analisis Data	60
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		69
A.	Gambaran Umum	69
B.	Analisis Statistik Deskriptif	76
C.	Analisis Data Penelitian	79
D.	Pembahasan	89
BAB V PENUTUP		107
A.	Kesimpulan	107
B.	Keterbatasan Penelitian	109
C.	Implikasi Penelitian	109

DAFTAR PUSTAKA 111

LAMPIRAN.....I



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab – Latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fenom satu lambang"
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab - Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab – Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda skaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَّ...ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَّ...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-*atfāl*/raudahatul *atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-*madīnah* al-*munawwarah*/
al-*madīnatul* *munawwarah*
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-*birru*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi l `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

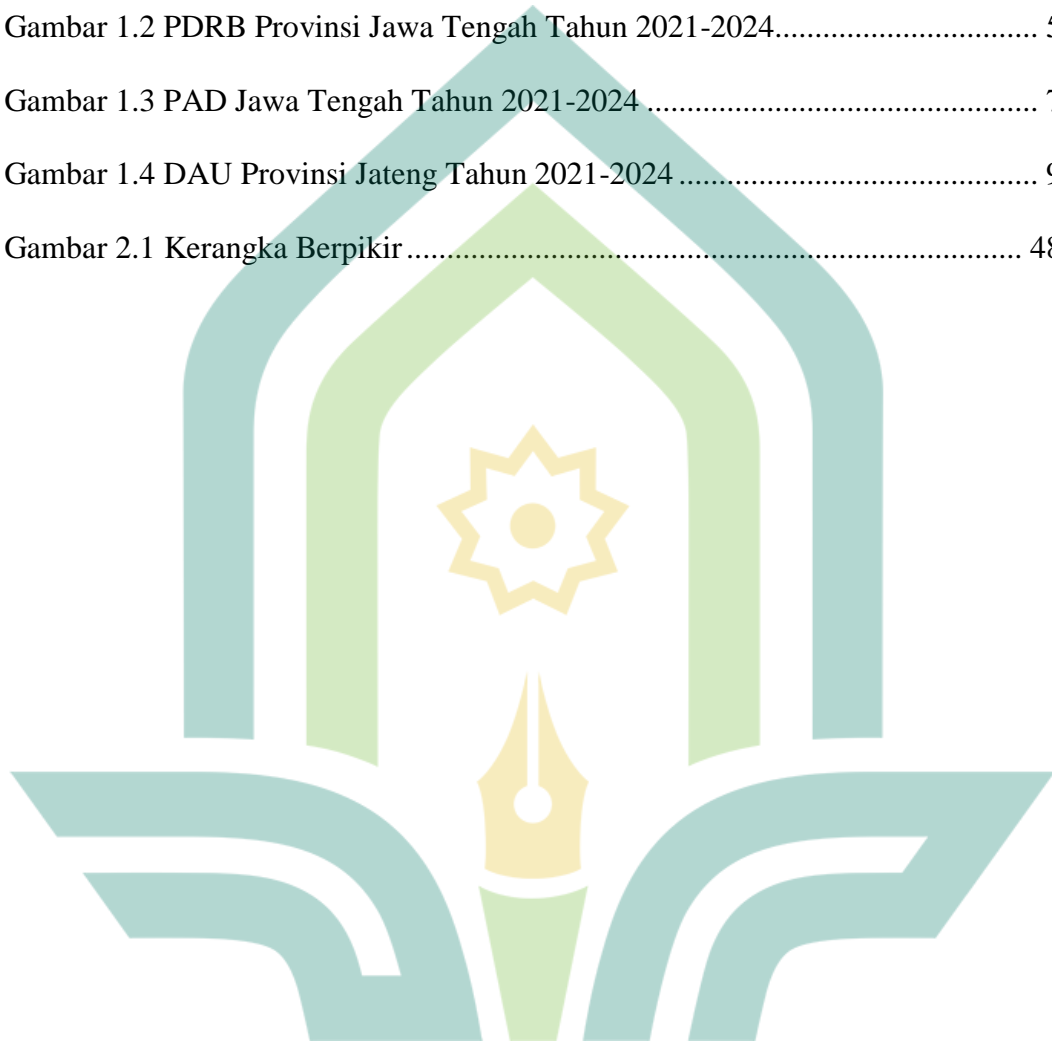
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	58
Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Kekuatan Korelasi.....	69
Tabel 4.1 Daftar Nama Kabupaten/kota Di Jawa Tengah.....	70
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	77
Tabel 4.3 Ketentuan Pemilihan Model Regresi	79
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow.....	79
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman.....	80
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	82
Tabel 4.8 Hasil Persamaan Regresi dengan Fixed Effect Model.....	83
Tabel 4.9 Hasil Uji t (Parsial)	85
Tabel 4.10 Hasil Uji F (Simultan).....	87
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	88
Tabel 4.12 Hasil Uji Korelasi Rank Spearman	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kemiskinan Provinsi Jateng Tahun 2021-2024	2
Gambar 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024.....	5
Gambar 1.3 PAD Jawa Tengah Tahun 2021-2024	7
Gambar 1.4 DAU Provinsi Jateng Tahun 2021-2024	9
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Observasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2021-2024.....	I
Lampiran 2 Data Observasi Dana Alokasi Umum Jawa Tengah Tahun 2021-2024.....	II
Lampiran 3 Data Observasi Dana Alokasi Khusus Jawa Tengah Tahun 2021-2024.....	III
Lampiran 4 Data Observasi Belanja Modal Jawa Tengah Tahun 2021-2024.	IV
Lampiran 5 Data Observasi Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Tahun 2021-2024.	V
Lampiran 6 Data Observasi Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2021-2024.....	VI
Lampiran 7 Hasil regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model.....	VII
Lampiran 8 Hasil Uji Chow	VIII
Equation 9 Hasil Uji Hausman.....	IX
Lampiran 10 Hasil Uji Multikolinearitas.	X
Lampiran 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	X
Lampiran 12 Hasil Uji Parsial dengan Fixed Effect Model Menggunakan Robust Standart Error.....	XI
Lampiran 13 Hasil Uji Simultan dengan Fixed Effect Model menggunakan Robust Standart Error.....	XII
Lampiran 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi dengan Fixed Effect Model menggunakan Robust Standart Error.	XIII
Lampiran 15 Hasil Uji Korelasi Rank Spearman.....	XIII

BAB I

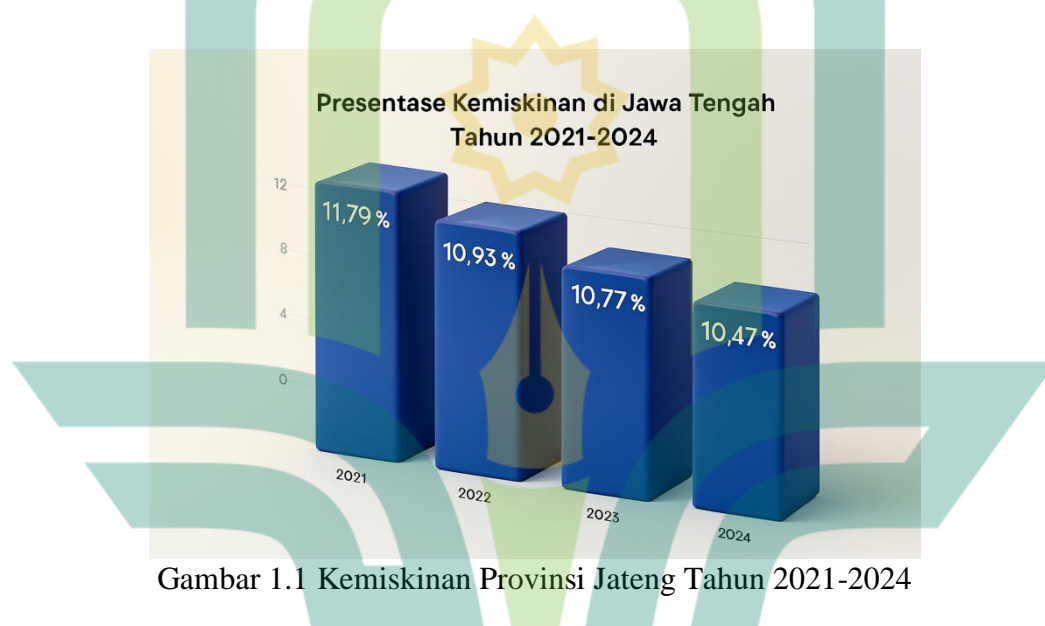
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah memiliki tujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan strategi yang dirancang secara sistematis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk pelaksanaan pembangunan sebagai wujud desentralisasi (Wijayanti & Darsana, 2013). Kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai situasi di mana kebutuhan esensial penduduk dapat dipenuhi, baik yang bersifat material maupun nonmaterial dengan mencakup indikator pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kelayakan lingkungan hidup. Peningkatan kesejahteraan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan daerah, karena indikator keberhasilan pembangunan tidak terbatas pada tingkat pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari distribusi hasil pembangunan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketika tingginya tingkat kesejahteraan maka masyarakat akan mempunyai ketersediaan pelayanan publik, kesempatan kerja, dan kualitas hidup yang memadai. Tingkat kesejahteraan yang rendah sering menjadi indikator adanya kemiskinan dalam suatu wilayah (Triani et al., 2020).

Kemiskinan menggambarkan kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan individu maupun rumah tangga dalam memenuhi standar minimum untuk keberlangsungan hidup, baik dari sisi pendapatan maupun

akses terhadap kebutuhan dasar. Kemiskinan mencerminkan kondisi seseorang atau rumah tangga tertentu tidak mempunyai kecukupan sumber daya untuk mencukupi tuntutan hidup yang layak maupun mempertahankan hak-hak dasarnya. Setiap individu memiliki hak-hak kebutuhan mencakup layanan kesehatan, ketersediaan pangan, akses pendidikan, kesempatan kerja, tempat tinggal yang layak, air bersih, pemanfaatan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman maupun kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan publik (Triani et al., 2020).



Gambar 1.1 Kemiskinan Provinsi Jateng Tahun 2021-2024

Sumber: (BPS, 2025)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tercatat ditahun 2021 sebesar 11,79%, ditahun 2022 menurun menjadi 10,93%, pada tahun 2023 juga menurun 10,77% dan ditahun 2024 mencapai angka 10,47%. Tren penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah memang dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah, namun penurunan kemiskinan belum dapat diartikan bahwa

kesejahteraan masyarakat telah meningkat secara menyeluruh. Tingginya angka kemiskinan di atas 10% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi kemungkinan belum sepenuhnya bersifat inklusif. Penurunan presentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih pada angka presentase kemiskinan golongan tinggi dibandingkan dengan rata-rata presentase nasional.

Provinsi Jawa Tengah memiliki presentase kemiskinan yang relative tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Presentase kemiskinan yang rendah diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 4,30%, Banten dengan nilai 5,84%, dan Jawa Barat dengan nilai 7,46%, serta Jawa Timur dengan nilai 9.79%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah dipilih karena memiliki tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi dibanding provinsi lain disertai perbedaan kemampuan fiskal dan pembangunan antar kabupaten/kota. Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat kedua dengan presentase tertinggi setelah DI Yogyakarta dengan nilai 10.83%, Provinsi Jawa Tengah tetap dipilih sebagai objek penelitian karena Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah yang luas dengan 35 kabupaten/kota, sedangkan DI Yogyakarta hanya 5 kabupaten/kota. Wilayah yang lebih luas membuat variasi data lebih beragam sehingga analisis menjadi lebih kuat (BPS, 2025).

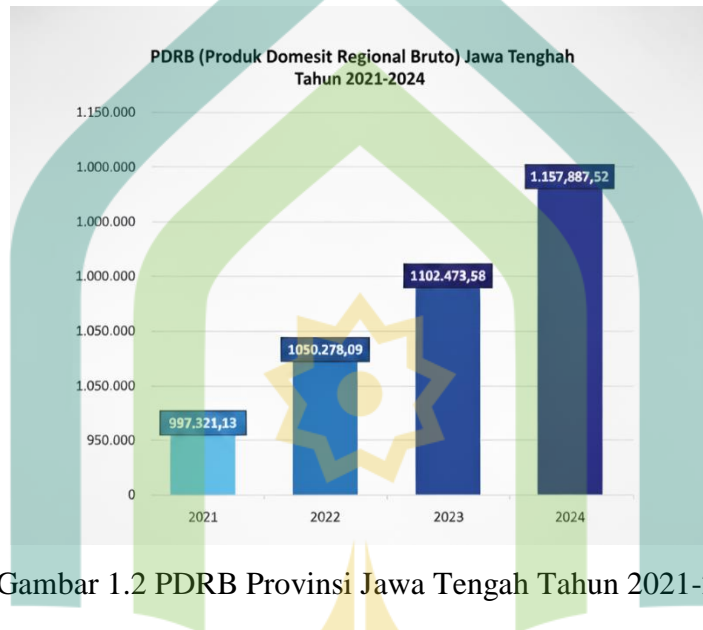
Fenomena penurunan presentase kemiskinan yang belum sebanding dengan kenaikan PDRB dapat disebabkan oleh distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung belum merata antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Pertumbuhan PDRB sering kali terjadi di sektor padat modal yang tidak sepenuhnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin (Triani et al., 2020). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah yang sempat berkontraksi di tahun 2020 menunjukkan pemulihan positif sepanjang 2021–2024, Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dinilai berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi representasi utama dari performa ekonomi suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi yang menjelaskan total nilai tambah yang dihasilkan melalui berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (Tri & Joko, 2023). Peningkatan nilai PDRB secara langsung merepresentasikan kenaikan penghasilan yang bersumber dari kontribusi sumber daya produksi dalam proses produksi. PDRB dapat dihitung melalui dua pendekatan utama, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dimana perhitungan nilai tambah barang dan jasa didasarkan pada harga yang berlaku dalam periode tertentu, sehingga mampu merefleksikan besaran pendapatan nominal yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah. Pengukuran tersebut tepat diterapkan untuk mengukur perkembangan ekonomi riil secara *agregat* maupun *sektoral* setiap tahunnya, yang tidak terdistorsi oleh perubahan harga (Zahari, 2017).

PDRB digunakan untuk menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi suatu daerah dan menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi regional. PDRB berfungsi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi yang lebih terarah, baik dalam konteks alokasi anggaran, perencanaan

investasi, maupun penyusunan strategi pembangunan sektoral (Purba et al., 2024). Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi dengan kedudukan strategis di kawasan pulau jawa yang menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang cukup signifikan tercermin dari peningkatan nilai PDRB.



Gambar 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024

Sumber: (BPS, 2025)

Kondisi PDRB Provinsi Jawa Tengah terus meningkat meskipun nilainya lebih rendah dari provinsi jawa lainnya. Data tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa ditahun 2021 PDRB Jawa Tengah sebesar 997.321,13 (dalam miliar rupiah), ditahun 2022 meningkat menjadi 1.050.278,09 (dalam miliar rupiah), ditahun 2023 meningkat menjadi 1.102.473,58 (dalam miliar rupiah), dan tahun 2024 naik menjadi 1.157.887,52. Peningkatan PDRB tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Jawa Tengah telah membaik secara merata. Peningkatan nilai PDRB mengindikasikan adanya peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di daerah tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan

ekonomi masyarakat, seperti perdagangan, industri, jasa, investasi, dan sektor lainnya, terus berkembang dari tahun ke tahun. Peningkatan PDRB yang terjadi relatif bersifat bertahap dan tidak mengalami lonjakan yang terlalu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cenderung stabil, namun kondisi tersebut tidak secara langsung dapat diartikan bahwa seluruh masyarakat telah merasakan peningkatan kesejahteraan secara merata.

Ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat antara wilayah pantura seperti Semarang dan Kendal dengan wilayah selatan dan barat contohnya Wonosobo dan Kebumen yang menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda, artinya distribusi pertumbuhan ekonomi yang belum merata. Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Pada prinsip otonomi daerah dan tugas bantuan dijelaskan bahwa setiap kewenangan pemerintah daerah mencakup pengaturan serta pengelolaan administrasi pemerintahan secara mandiri pada level provinsi, kabupaten, hingga kota. Otonomi daerah sebagai penguatan kapasitas fiskal daerah merupakan elemen kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang independen dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat daerah (Juwita & Widia, 2022).

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran melalui APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal tercermin melalui pengelolaan APBD yang meliputi pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah seperti PAD, DAU,

DAK, DBH, dan Dana transfer lainnya. Penerimaan ini menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah, terlihat jika semakin besar penerimaan daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah membiayai aktivitas ekonomi produktif. Belanja pemerintah meliputi belanja modal, belanja rutin, belanja transfer, belanja tidak terduga.

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu wilayah. Daerah dengan proporsi PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola potensi ekonomi lokal, memperkuat basis pajak, serta menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Apabila kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah rendah, kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri dalam membiayai kebutuhan pembangunan maupun pelayanan publik dan masih bergantung pada dukungan dana transfer dari pemerintah pusat (Gulo, 2022).



Gambar 1.3 PAD Jawa Tengah Tahun 2021-2024

Sumber: (BPS, 2021)

Data Pendapatan Asli Daerah ditahun 2021 pemerintah provinsi jawa tengah sebesar 31.611,20 (dalam milliyar rupiah) dan mengalami peningkatan ditahun 2022 dengan nilai sebesar 32.762,03 (dalam milliyar rupiah) serta ditahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 30.990,31 (dalam milliyar rupiah), di tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 36.958,03 (dalam milliyar rupiah). Peningkatan PAD secara umum menunjukkan bahwa PAD Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan yang cukup baik meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023. Fluktuasi PAD menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih belum sepenuhnya stabil. Ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu dapat menjadi faktor yang menyebabkan PAD mudah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan dan menggali potensi ekonomi daerah secara lebih optimal agar penerimaan daerah menjadi lebih berkelanjutan.

Pendapatan daerah masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum yang dibiayai oleh pusat. Dana Alokasi Umum adalah pemberian dana dari pemerintah pusat yang diberikan untuk mendanai kebutuhan umum pemerintahan daerah dan tidak ditentukan penggunaannya secara spesifik oleh pemerintah pusat. Sistem transfer daerah bertujuan untuk mewujudkan pengalokasian dana yang dilakukan dengan prinsip keadilan, pemerataan, demokratis, transparan, serta berorientasi pada efisiensi (Santoso, 2020). DAU digunakan untuk memperkecil ketimpangan anggaran antar daerah dan ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Alokasi Umum mencerminkan

lemahnya kapasitas fiskal daerah (Gulo, 2022). Ada juga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. DAK diberikan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dengan sifat yang lebih spesifik dan kadang bersifat darurat, tergantung pada kebutuhan dan prioritas pembangunan tertentu di daerah. pemerintah pusat menyalurkan DAK untuk mendukung peningkatan penyediaan sarana dan prasarana fisik di daerah, terutama yang sejalan dengan prioritas nasional (Andriana, 2020).



Gambar 1.4 DAU Provinsi Jateng Tahun 2021-2024

Sumber: (DJPk, 2024)

Kondisi DAU di tahun 2021 - 2022 mengalami penurunan sebesar $\pm 3,1\%$. Hal ini bisa mengindikasikan adanya efisiensi anggaran atau penyesuaian fiskal dari pusat pasca-pandemi. Di tahun 2023 DAU kembali meningkat sekitar 3,6% yang dapat mencerminkan pemulihan fiskal dan peningkatan kapasitas belanja daerah. Di tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sekitar 7,4%, hal ini memberi sinyal bahwa pemerintah pusat memberikan stimulus lebih besar ke daerah. Penurunan DAU pada periode 2022 berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam

membiayai program pembangunan dan pelayanan publik menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas. Akibatnya, pemerintah daerah mungkin perlu melakukan penyesuaian prioritas anggaran, terutama pada kegiatan yang bersifat pembangunan. Peningkatan jumlah DAU mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah.

Kondisi DAU selama tahun 2021–2024 menunjukkan adanya proses penyesuaian dan pemulihan fiskal yang terjadi secara bertahap. Fluktuasi transfer dana dari pemerintah pusat sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan kebijakan fiskal yang diterapkan. Pemerintah daerah tidak hanya perlu bergantung pada peningkatan DAU, namun perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lain seperti DAK. Dana Alokasi Khusus memiliki peran dalam mendukung penerimaan dan pembangunan daerah. Jika alokasi DAK yang diterima suatu daerah semakin tinggi, maka semakin besar pula kemampuannya dalam mengalokasikan pendapatan untuk membiayai berbagai kegiatan khusus, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan pelayanan publik dasar lainnya (Septriani, 2023). DAK diprioritaskan bagi daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan fiskal antarwilayah.

Keberadaan DAU dan DAK berperan strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta

terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Septriani, 2023). Pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada tuntutan untuk tidak semata-mata bergantung pada pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat, seperti DAU dan DAK, daerah dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya secara mandiri melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Maisarah & Anwar, 2023). Kondisi alokasi dana belum optimal terlihat ketika sebagian anggaran daerah masih lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dan operasional, dibandingkan belanja yang bersifat produktif. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan proporsi anggaran yang diarahkan pada belanja modal sebagai salah satu komponen pengeluaran daerah yang berorientasi pada pembangunan. Belanja Modal menjadi bagian krusial dalam struktur pengeluaran daerah dalam anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembiayaan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana publik, serta investasi jangka panjang lainnya. Peran strategis Belanja Modal terletak pada kemampuannya menciptakan efek berantai (*multiplier effect*) terhadap kegiatan ekonomi daerah.

Belanja Modal dipahami sebagai beban anggaran yang dialokasikan dengan tujuan memperoleh aset tetap maupun aset non-fisik yang mampu menghasilkan nilai tambah dalam rentang waktu yang lama, melebihi satu periode akuntansi. Ruang lingkup Belanja Modal meliputi pembelian tanah, pembangunan gedung, pengadaan sarana dan peralatan, hingga perolehan aset

tak berwujud yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Pembangunan ekonomi di daerah Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari peran pendapatan daerah baik yang bersumber dari dari potensi lokal seperti PAD, maupun dari transfer pusat seperti DAU dan DAK, terdapat juga Belanja Modal juga memiliki peran sebagai instrumen pengeluaran daerah yang secara langsung diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan aset produktif.

Peningkatan PAD, DAU, dan DAK, yang diikuti dengan bertambahnya Belanja Modal seharusnya berfungsi sebagai penggerak utama pembangunan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Yustriawan, 2021). Dampak tersebut tercermin melalui kenaikan Produk Domestik Regional Bruto serta memberikan kontribusi penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pengaruh fiskal seperti PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap PDRB tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berdasarkan penelitian Islami & Nababan (2020) menunjukkan hasil bahwa PAD memberikan pengaruh signifikan terhadap PDRB, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmayanti et al. (2021) yang menunjukkan hasil PAD tidak terdapat pengaruh signifikan pada PDRB. Hal ini PAD sering kali digunakan untuk belanja operasional, gaji pegawai, dan belanja rutin lainnya tidak digunakan untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan atau industri produktif. Menurut penelitian Romeo et al. (2023) menyatakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat pertumbuhan PDRB. Penelitian Ama & Renggo (2022)

menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap PDRB, melihat Belanja Modal sebagai investasi untuk perkembangan suatu daerah untuk penanaman aset daerah sejak dini.

Pembaharuan penelitian ini terletak pada integrasi variabel fiskal daerah dan variabel sosial dalam satu model penelitian. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada hubungan instrument fiskal tanpa menghubungkan dengan kemiskinan secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan menempatkan kemiskinan sebagai variabel korelasi terhadap PDRB. Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan dua atau tiga variabel fiskal. Penelitian ini mencoba menggabungkan seluruh instrumen fiskal utama daerah dalam satu kerangka analisis sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kapasitas fiskal daerah mempengaruhi aktivitas ekonomi regional. Pada penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengelolaan dana fiskal daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah Tahun 2021-2024?

- b. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah Tahun 2021-2024?
- c. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah Tahun 2021-2024?
- d. Apakah Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah Tahun 2021-2024?
- e. Apakah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah Tahun 2021-2024?
- f. Apakah terdapat hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto dengan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2021-2024?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan pembahasan pada rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara parsial.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara parsial.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara parsial.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara parsial.

- e. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara simultan.
- f. Untuk mengetahui korelasi antara Produk Domestik Regional Bruto dengan Kemiskinan.

2. Manfaat

I. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap PDRB, sehingga dapat sebagai bahan evaluasi pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin.

II. Manfaat Praktik

a. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang mekanisme interaksi antara instrumen fiskal dan output ekonomi daerah, sehingga memperkaya pengetahuan akademik. Penelitian ini dapat memberikan hasil sebagai rujukan untuk melakukan penelitian lanjutan dalam topik serupa dengan pendekatan dan kerangka teori yang lebih berkembang.

b Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan alokasi anggaran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta hubungannya dengan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai peran instrumen fiskal daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

c Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan, pendukung kajian teoritis bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik mengkaji topik instrumen fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian, tinjauan pustaka terkait hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, serta penyusunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, penjelasan variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi mengenai gambaran umum terkait lokasi penelitian, deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data yang mencakup uji chow, uji hausman, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan potensi implikasi teoritis dan praktis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori Pertumbuhan Endogen dikemukakan dan dikembangkan oleh Paul M. Romer pada pertengahan hingga akhir 1980-an. Teori Pertumbuhan Endogen pada dasarnya menekankan bahwa perkembangan ekonomi terutama dipicu oleh faktor-faktor yang berasal dari internal sistem ekonomi itu sendiri melalui kebijakan, investasi, dan inovasi. Kerangka teori ini, pertumbuhan dipandang sebagai hasil dari dinamika internal perekonomian, bukan akibat pengaruh eksternal. Lahirnya Teori Pertumbuhan Endogen didorong oleh keinginan untuk memahami mengapa terdapat perbedaan laju pertumbuhan antar negara, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan tersebut. Fokus utamanya adalah pada bagian residual dari model pertumbuhan Solow, yaitu komponen yang tidak dapat dijelaskan oleh akumulasi modal maupun tenaga kerja (Liana et al., 2024).

Pada tahap awal, teori neoklasik menilai bahwa ketidakseimbangan antara jumlah modal yang rendah dengan ketersediaan jumlah angkatan kerja yang besar di negara-negara berkembang seharusnya menciptakan kondisi di mana tingkat pengembalian investasi relatif lebih besar dibandingkan di negara maju yang memiliki rasio modal terhadap tenaga kerja lebih tinggi. Bertumpu pada asumsi tersebut, lembaga internasional

seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia mendorong negara-negara berkembang untuk menerapkan orientasi berbasis pasar serta menjalankan kebijakan liberalisasi perdagangan. Pada realitas empirisnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang berlangsung sangat terbatas, bahkan sebagian tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Ketidaksesuaian antara prediksi teoretis dan kenyataan inilah yang menjadi dasar lahirnya Teori Pertumbuhan Endogen (Mahri et al., 2021).

Teori Pertumbuhan Endogen menjelaskan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Intervensi tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan barang publik, khususnya infrastruktur, yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas ekonomi. Pemerintah juga dapat memfasilitasi investasi swasta pada sektor-sektor berbasis pengetahuan yang berpotensi mempercepat proses akumulasi modal manusia. Pada konteks negara berkembang, penerapan kerangka ini menjadi semakin relevan, mengingat kebutuhan untuk keluar dari jebakan pertumbuhan rendah hanya dapat dicapai melalui fokus utama strategi pembangunan dirancang dengan menempatkan peningkatan mutu sumber daya manusia serta penguatan kapasitas teknologi domestik (Mahri et al., 2021).

Teori pertumbuhan baru atau Teori Pertumbuhan Endogen menekankan bahwa investasi pada modal fisik maupun modal manusia merupakan faktor utama yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi

dalam jangka panjang. Teori tersebut menegaskan pentingnya peran kebijakan publik dalam mempercepat pembangunan, baik melalui investasi langsung maupun tidak langsung yang diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui kebijakan fiskal, yang tercermin pada perubahan pola konsumsi masyarakat, alokasi belanja untuk investasi publik, serta optimalisasi penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Todaro & Smith, 2015).

2. Teori Pembangunan Islam

Teori Pembangunan Islam berlandaskan pada prinsip bahwa pembangunan tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (*falah*). Konsep *falah* menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah (Aryu Inayati, 2013). Salah satu tokoh yang dianggap sebagai pelopor awal Teori Pembangunan Islam adalah Ibnu Khaldun (1332–1406 M) melalui karya besarnya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa kemajuan suatu masyarakat dipengaruhi oleh hubungan yang saling berkaitan antara pemerintah, masyarakat, kekayaan, aktivitas ekonomi, keadilan, dan pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang berhasil ditentukan oleh besarnya kekayaan suatu negara, pengelolaan sumber daya, kebijakan pemerintah yang adil, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Khaldun, 2011). Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa negara

memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui kebijakan dan pengeluaran yang produktif. Jika pengelolaan pendapatan dan belanja negara semakin baik, maka aktivitas ekonomi akan meningkat sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Zuya et al., 2025).

Pada konsep fiskal yang mencakup PAD berupa pajak daerah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pengelolaan fiskal harus dilakukan secara seimbang melalui penerapan kebijakan pajak yang wajar dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Besaran pajak seharusnya tidak memberatkan pelaku ekonomi, karena beban yang terlalu tinggi dapat mengurangi semangat masyarakat dalam melakukan kegiatan produksi, perdagangan, maupun investasi (Arivah & Iqbal, 2025). Pembangunan ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang adil dan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Hal ini Teori Ibnu Khaldun, DAU dan DAK mencerminkan prinsip keadilan distributif, dimana pemerintah berupaya mendistribusikan sumber daya kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih rendah agar pembangunan tidak terpusat pada wilayah tertentu saja. Pemerataan daerah yang optimal dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat lebih berkembang dan meningkatkan kesejahteraan.

Pada pandangan Ibnu Khaldun negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung berkembangnya

aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah berkewajiban menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam karyanya *Muqaddimah* bahwa kemajuan ekonomi suatu wilayah dikendalikan oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang baik akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi melalui penyediaan sarana pendukung yang mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan. Hal ini Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau membangun fasilitas publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Teori Pembangunan Islam perspektif Ibnu Khaldun dapat dikaitkan dengan konsep Maqashid Syariah dengan tujuan utama ditetapkannya syariat Islam yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan (*maslahah*). Pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan indikator ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh. Konsep Maqashid Syariah secara klasik terdiri dari lima tujuan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Prinsip tersebut berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan kegiatan ekonomi agar mempertimbangkan implikasi sosial, moral, dan spiritual (Algifari & Andrini, 2024).

Maqashid Syariah memiliki relevansi yang signifikan dalam penerapan kebijakan fiskal, Pada prinsip *hifz al-mal* merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan, pengelolaan, pengembangan, dan distribusi kekayaan secara adil demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Prinsip *hifz al-mal* dimaknai sebagai upaya menjaga kepemilikan harta dari kehilangan atau kerusakan, dan mencakup pengelolaan sumber daya ekonomi secara produktif agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Pengelolaan PAD, DAU, dan DAK dapat dipandang sebagai instrumen yang mendukung implementasi prinsip *hifz al-mal*, karena berperan dalam menjaga dan mengembangkan sumber daya ekonomi daerah. Pemanfaatan dana tersebut secara efektif memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja Modal menjadi implementasi prinsip *hifz al-mal* yang berfungsi mengubah sumber daya keuangan daerah menjadi aset produktif yang bernilai ekonomi. Alokasi Belanja Modal dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dapat memperkuat kapasitas ekonomi daerah, meningkatkan output regional, serta mendukung terciptanya kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan (Hidayat et al., 2022).

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan hasil nyata dari penerapan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, dan menunjukkan bagaimana perubahan aktivitas ekonomi terjadi melalui interaksi berbagai

sektor. Di tingkat regional, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi, karena mampu menggambarkan peningkatan pendapatan masyarakat serta kapasitas ekonomi suatu daerah (Saniah & Murtala, 2023). PDRB tidak hanya menjadi alat ukur kuantitatif, namun juga memberikan pemahaman mengenai efektivitas kebijakan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Menurut Sukirno (2016) PDRB adalah kumulasi kontribusi yang berasal dari seluruh unit produksi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, yang pada umumnya diukur berdasarkan rentang waktu per tahun. Prinsip kebijakan fiskal menekankan bahwa PDRB mencerminkan kinerja ekonomi daerah, dan sering digunakan untuk menilai kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan wilayah. Menurut Todaro & Smith (2015) PDRB merupakan alat ukur untuk pertumbuhan dan output ekonomi regional, yang mencerminkan kapasitas produksi dan tingkat kesejahteraan daerah. Secara individu, peningkatan pendapatan berimplikasi pada kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi berbagai pungutan atau kontribusi yang ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip tersebut dapat diterapkan pada skala makro, di mana pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan kapasitas ekonomi suatu daerah dalam meningkatkan potensi penerimaan fiskal (Hertanto & Sriyana, 2011).

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setiap wilayah pada hakikatnya menyimpan potensi sumber daya yang dapat dioptimalkan guna menghasilkan penerimaan bagi wilayah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pemanfaatan potensi daerah kemudian menjadi komponen penting dalam menopang keberlangsungan roda pemerintahan sekaligus mendukung aktivitas perekonomian daerah agar mampu berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Alvaro & Wibowo, 2020). Menurut Mardiasmo (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan potensi ekonomi konomi lokal yang dimiliki suatu wilayah dan berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah (pajak motor, pajak reklame, BBNKB, PBB), retribusi daerah (pelayanan kesehatan, parkir, pasar, terminal, pelayanan kebersihan, perizinan tertentu), dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah daerah memfasilitasi pengelolaan sumber daya keuangan secara mandiri dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah. Tingkat kontribusi PAD sering dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana kemandirian fiskal suatu daerah telah tercapai. Pengelolaan PAD dalam perspektif Ekonomi Pembangunan Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, namun juga harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat

(Santoso, 2020). Prinsip keadilan sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nahl ayat 90, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat Kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” An-Nahl [90]:14 (Kementerian Agama, 2025).

Menurut Ibnu Katsir (2000), keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak, sedangkan ihsan merupakan perilaku yang melampaui batas kewajiban dengan tujuan menciptakan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat. Ayat tersebut mengandung perintah untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan pengelolaan keuangan publik. Pada konteks PAD, prinsip *'adl* menjelaskan bahwa menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan hak masing-masing sehingga tercipta kesejahteraan yang merata. Prinsip *'adl* dalam APBD berarti pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dana yang tersedia tidak hanya difokuskan pada pembangunan wilayah tertentu atau kepentingan kelompok tertentu, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas

melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan program pengentasan kemiskinan.

Pengelolaan APBD mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah harus menghindari praktik riba dalam pengelolaan keuangan yang mengandung unsur keuntungan yang tidak adil atau merugikan pihak lain. Prinsip larangan riba dapat diterapkan melalui penggunaan sumber pembiayaan yang sehat dan menghindari ketergantungan yang berlebihan pada skema pembiayaan yang menimbulkan beban bunga tinggi atau dapat membahayakan stabilitas keuangan daerah. Pengelolaan keuangan publik harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko fiskal jangka panjang. Pengelolaan APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memiliki kejelasan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya masuk kedalam prinsip larangan gharar. Setiap alokasi anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, mekanisme penggunaan yang terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Aisi & Rosmanidar, 2026).

Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip ekonomi syariah akan mampu menciptakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Jika pendapatan masyarakat daerah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maka kesejahteraan masyarakat tidak dalam kategori rendah (Lestari et al., 2023). Peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui alokasi anggaran

yang efektif berlandaskan prinsip keadilan (*al-adl*), transparansi (*ash-shafafiyah*), dan keberlanjutan (*al-istiqrar*). PAD yang dihasilkan harus dari aktivitas yang halal dengan menghindari riba, gharar, dan maysir. Hal ini kebijakan otonomi daerah memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi daerahnya (Hatmaka, 2024).

5. Dana Alokasi Umum (DAU)

Kebijakan desentralisasi fiskal merujuk pada upaya pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan di bidang keuangan kepada pemerintah daerah. Adanya kewenangan tersebut, daerah memiliki ruang otonom untuk mengatur sumber pendapatan dan menentukan prioritas belanja guna mendukung penyediaan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan desentralisasi fiskal dirancang untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan ruang lebih luas bagi daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan serta partisipasi masyarakat, sekaligus mengembangkan daya saing daerah. Seluruh proses tersebut dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, serta mempertimbangkan kekhasan dan potensi yang dimiliki setiap daerah (Ridwan & Nawir, 2021).

Menurut Wahyuningsih (2018) Desentralisasi fiskal memiliki tiga pilar utama, yaitu devolusi kewenangan pengeluaran, devolusi kewenangan penerimaan, serta mekanisme transfer fiskal antar pemerintah. Devolusi

pengeluaran mencerminkan Penyerahan kewenangan pengelolaan belanja publik kepada pemerintah daerah, sedangkan devolusi penerimaan terkait melalui pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan serta mengatur potensi Pendapatan Asli Daerah. Adapun pemindahan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mengoreksi ketimpangan fiskal dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara merata.

Menurut Mardiasmo (2018) Dana Alokasi Umum merujuk pada salah satu instrumen fiskal yang bersumber dari prinsip-prinsip fiskal desentralisasi dalam aspek redistribusi fiskal dengan tujuan mendorong keadilan antar daerah, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kapasitas pelayanan publik (Darise, 2024). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan, pemerintah pusat menetapkan bahwa total Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan ke pemerintah daerah minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDN) yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BPK RI, 2005). Penentuan proporsi DAU yang diterima tiap daerah tidak seragam, melainkan ditentukan berdasarkan metode perhitungan tertentu yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan keuangan daerah secara proporsional. Dana Alokasi Umum (DAU) dibagikan sesuai prinsip pemerataan. Mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan berdasarkan keseimbangan antara kemampuan keuangan dan tuntutan pembiayaan daerah.

6. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) disediakan oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah atau *fiscal gap*. Pemerintah pusat menyediakan alokasi pendanaan tambahan sebagai bentuk intervensi fiskal bagi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas keuangan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara lebih optimal (Islami & Nababan, 2020). Menurut Suhardi (2018) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan komponen penerimaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus. Pengalokasian dana ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang memiliki karakteristik spesifik dan tetap mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional.

DAK diperuntukkan bagi daerah-daerah yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu untuk melaksanakan program dengan tujuan khusus, sehingga penentuan dan distribusinya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagai bagian dari kebijakan fiskal dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional (Lulage et al., 2023). Pengalokasian DAK diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan fasilitas pelayanan publik yang sesuai dengan standar nasional, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di tingkat daerah. Pemanfaatan DAK

difokuskan pada pembiayaan kegiatan investasi jangka pendek maupun jangka panjang, yang bersifat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperbaiki dan mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat (Afferina et al., 2024).

Dana Alokasi Khusus terbagi menjadi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus non Fisik. Pada Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki peran penting sebagai alat untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pemerintah pusat menggunakan DAK Fisik sebagai bentuk intervensi kebijakan fiskal untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal tetap mampu menyediakan layanan publik yang memadai. Keberadaan DAK Fisik tidak berfungsi sebagai sumber pendanaan dan sebagai mekanisme untuk mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional di tingkat daerah (Aprizal et al., 2025). Pengeluaran pemerintah pada sektor produktif seperti infrastruktur dapat mendorong masuknya investasi swasta. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya tarik suatu daerah bagi investor karena biaya produksi menjadi lebih rendah dan akses pasar menjadi lebih luas (Wibowo, 2023). DAK Fisik akan meningkatkan permintaan agregat, yang mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga peningkatan.

7. Belanja Modal

Belanja Modal dipandang sebagai kebijakan fiskal yang memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai pendorong utama dalam peningkatan

aktivitas ekonomi, terutama pada lingkup pemerintahan daerah. Pemerintah dalam mengalokasikan belanja tidak hanya menambah kapasitas aset publik, namun juga menciptakan *multiplier effect* yang berkontribusi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi regional (Andriana, 2020). Menurut (Mardiasmo, 2018) Belanja Modal adalah alokasi pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk memperoleh maupun memperbanyak aset tetap serta kekayaan daerah yang memiliki manfaat jangka panjang melampaui satu periode anggaran. Alokasi Belanja Modal diarahkan untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap serta memperkuat basis kekayaan daerah, sehingga berfungsi sebagai investasi publik. Hal ini Belanja Modal dinyatakan sebagai investasi pemerintah guna meningkatkan pelayanan daerah yang akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah.

Belanja Modal mencerminkan alokasi dana pemerintah yang ditujukan untuk pembiayaan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana publik, serta investasi lain yang bersifat produktif dan berjangka panjang. Keunggulan utama pada Belanja Modal yaitu kemampuannya menciptakan dampak ganda yang ditimbulkan terhadap berbagai sektor ekonomi akibat adanya peningkatan permintaan dan aktivitas ekonomi sebagai hasil dari proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar mobilitas barang dan jasa, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas akses pasar bagi pelaku ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang terakselerasi

melalui Belanja Modal berimplikasi langsung terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah (Andriana, 2020).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia secara optimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pada Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertera jelas mengenai Pemerintah daerah menetapkan bahwa alokasi belanja daerah diarahkan untuk menjamin perlindungan sosial sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (BPK RI, 2004). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengelompokkan pengeluaran daerah ke dalam dua jenis utama, yakni belanja langsung serta belanja tidak langsung.

Belanja Modal dapat dikategorikan ke dalam belanja langsung dalam beberapa konteks penganggaran, dalam penelitian ini Belanja Modal diposisikan sebagai bagian dari belanja tidak langsung karena orientasinya yang lebih bersifat investasi jangka panjang. Belanja Modal mencakup pengadaan tanah, pembangunan gedung dan bangunan, pembelian peralatan dan mesin, serta aset tidak berwujud lainnya. Karakteristik jangka panjang dari Belanja Modal menjadikannya penting dalam memperkuat kapasitas infrastruktur daerah, mendukung produktivitas ekonomi, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja Modal memiliki peranan krusial sebagai

alat kebijakan fiskal yang memperkuat kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik (Maulina et al., 2021).

8. Kemiskinan

Kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak, baik kebutuhan material maupun spiritual. Kemiskinan tercermin dalam minimnya peluang kerja dan usaha produktif, keterbatasan akses terhadap perumahan layak dan fasilitas sanitasi memadai, serta kesulitan memperoleh air bersih. Faktor lain yang memperburuk keadaan meliputi ketidakpastian dalam hak kepemilikan dan pengelolaan lahan, terbatasnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta tingginya beban ketergantungan keluarga akibat jumlah tanggungan yang besar (Triani et al., 2020). Menurut Kuncoro (2000) Fenomena kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif menggambarkan keadaan ketika individu atau rumah tangga tidak mampu mencapai standar hidup yang layak yang diterima secara umum di masyarakat wilayah tertentu. Sementara itu, kemiskinan absolut merujuk pada kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi standar hidup minimum yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang bersifat pangan maupun non-pangan. (Aziz et al., 2016).

Ekonomi pembangunan Islam memandang kemiskinan sebagai hasil dari berbagai faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, dan moral yang saling

berkaitan. Pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi semata, namun memerlukan keadilan distribusi, pemerintahan yang amanah, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan instrumen ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat (Mahri et al., 2021).

Pada Ekonomi Pembangunan Islam, alat mengukur kemiskinan dapat menggunakan *Had Kifayah*, salah satu alat ukur kemiskinan yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menentukan tingkat kebutuhan dasar seseorang atau rumah tangga dalam perspektif Islam. Konsep ini berasal dari istilah Arab *ḥadd al-kifāyah* yang berarti batas kecukupan, yaitu standar minimum kebutuhan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan prinsip syariah dan martabat kemanusiaan. BAZNAS mengembangkan pengukuran *Had Kifayah* berdasarkan beberapa dimensi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta kebutuhan pendukung lainnya yang dianggap penting untuk menjalankan kehidupan secara layak. *Had Kifayah* mencerminkan tujuan maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, ukuran kemiskinan tidak hanya dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan fisik, namun juga kemampuan seseorang untuk mempertahankan kualitas hidup yang mendukung pelaksanaan fungsi sosial dan keagamaannya. Jika semakin jauh pendapatan rumah tangga berada di bawah nilai *Had Kifayah*, maka

semakin tinggi tingkat kerentanan dan kemiskinan yang dialami rumah tangga tersebut (Mahri et al., 2021).

Pada tingkat mikro, kemiskinan muncul sebagai konsekuensi dari ketidakmerataan penguasaan sumber daya antar individu yang akhirnya memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan berakar pada disparitas kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan tingkat pendidikan yang belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya keterampilan dan kompetensi yang dimiliki, yang kemudian membatasi peluang memperoleh pendapatan yang memadai. Kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran. Fenomena kemiskinan juga berkaitan erat dengan kesenjangan sosial, yang tercermin dalam distribusi pendapatan nasional yang tidak merata maupun dalam ketidakmerataan hasil pembangunan (Triani et al., 2020).

B. Telaah Pustaka

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rani Wulantari, Meidy Haviz (2021).	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat 2003-2017.”	Independent: PAD, DAU, PMDN Dependen: PDRB	PAD dan DAU berpengaruh positif secara signifikan terhadap PDRB, sedangkan PMDN berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB. Hasil pengujian secara simultan, bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.	Penelitian ini menggunakan variabel PAD dan DAU yang mempengaruhi PDRB.	Penelitian ini menggunakan tambahan variabel Belanja Modal dan terdapat variabel kemiskinan untuk di korelasikan dengan PDRB.

2.	Heniwati Gulo (2022).	“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.”	Independen: PAD, DAU, DBH Dependen: PDRB	PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Pada DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Secara simultan, PAD, DAU, dan DBH terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.	Penelitian ini menggunakan variabel PAD dan DAU terhadap PDRB.	Tempat penelitian yang digunakan berbeda. Penelitian yang akan dilakukan terdapat metode korelasi dan terdapat tambahan variabel X yaitu Belanja Modal.
----	-----------------------	--	---	---	--	---

3.	Fanni Novianti, Westi Riani, Ade Yunita Mafruhah (2022)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita di Jawa Barat Periode 2011- 2020.”	Independen: PAD, Belanja Modal, Dana Perimbangan Dependen: PDRB	Adanya pengaruh nyata antara PAD terhadap PDRB, sedangkan hasil lain tidak adanya pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB.	Penelitian ini menggunakan variabel PAD dan Belanja Modal yang mempengaruhi PDRB.	Penelitian ini menambahkan variabel independen Dana Alokasi Umum, dan terdapat 2 metode analisis data penelitian yaitu analisis regresi berganda dan analisis korelasi rank spearman.
4.	Nurlaili Tito Wardani, Muchtolifah (2022).	“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal	Independent: PAD, DAU, PMDN, PMA Dependen: PDRB	Hasil secara parsial menunjukkan PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB sedangkan DAU, PMDN dan PMA tidak	Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi PDRB.	Penelitian ini terdapat tambahan variabel independen Belanja Modal dan variabel Kemiskinan yang

		Asing terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur.”		berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa PAD, DAU, PMDN dan PMA secara bersama-sama berdampak signifikan terhadap PDRB.		akan di korelasikan dengan PDRB.
5.	Erlyger Romeo Nabel Pasaribu, M.B Nani Ariani (2023).	“Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Belanja Modal, Dan Pengguna Internet Terhadap Tingkat Pertumbuhan PDRB Di	Independen: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Belanja Modal, Pengguna Interner	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Belanja Modal, dan Penggunaan Internet berpengaruh terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.	Penelitian ini menggunakan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi ditujukan dengan PDRB.	Penelitian ini terdapat pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB, dengan tambahan metode analisis data yaitu korelasi rank spearman.

		Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.”	Dependen: Tingkat Pertumbuhan PDRB			Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021- 2024.
6.	Maisarah, Khairil Anwar (2023).	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh.”	Independen: PAD, Jumlah Penduduk Dependen: PDRB	Hasil secara parsial menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hasil secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Penduduk berpengaruh	Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi PDRB.	Penelitian ini menggunakan tambahan variabel DAU dan Belanja Modal mempengaruhi PDRB, dan di korelasikan dengan kemiskinan.

				signifikan terhadap PDRB.		
7.	A. Ferry Risnu Murti, Syamsurijal Tan, Zulfanetti (2023).	“Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap PDRB Dan Hubungannya dengan Kemiskinan di Kota Jambi”.	Independen: PAD, DAU, DAK, Belanja Modal Dependen: PDRB Variabel korelasi: Kemiskinan	Hasil secara parsial menunjukan terdapat PAD, dan DAK terhadap PDRB. Adanya pengaruh tidak signifikan antara DAU dan Belanja Modal terhadap PDRB. Hasil simultan PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil Korelasi antar variabel meunjukkan	Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal mempengaruhi PDRB.	Penelitian ini bertempat di Jawa Tengah dengan menggunakan data panel yang memiliki rentang waktu jangka pendek yaitu tahun 2021-2024 dan cross section 35 kabupaten/kota. Analisis korelasi menggunakan Rank Spearman.

				adanya hubungan yang signifikan antara PDRB dengan kemiskinan di Kota Jambi Periode 2000-2020.		
8.	Aln Pujo Priambodo, Nur Wahyu Hidayat (2024).	“Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.”	Independen: PAD, DAU, DBH, Belanja Modal Dependen: PDRB, Kemiskinan	PAD berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB, namun DAU, DBH, dan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB. Hasil secara parsial PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap	Penelitian ini sama menerapkan variabel independen yaitu PAD, DAU, Belanja Modal dan variabel dependen PDRB.	Penelitian ini terdapat 2 analisis yaitu analisis regresi dengan analisis korelasi rank spearman antara PDRB dengan kemiskinan.

				<p>kemiskinan. Hasil secara simultan PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDRB ataupun tingkat kemiskinan.</p>		
9.	<p>Alya Fauzi Zaizafun, Wartoyo, Diana Djuwita (2024).</p>	<p>“Pengaruh Penerimaan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di</p>	<p>Independen: Penerimaan Pajak, DAU, Pengeluaran Pemerintah Dependen: PDRB</p>	<p>Penerimaan pajak, DAU, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil secara bersama-sama bahwa ketiga variabel independen berpengaruh</p>	<p>Penelitian ini menggunakan variable DAU sebagai variable Independen dengan Variable dependen Pertumbuhan Ekonomi yang ditujukan dengan data PDRB.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan variabel independen PAD dan Belanja Modal dan terdapat variabel kemiskinan yang akan di korelasikan dengan PDRB di Kabupaten/kota</p>

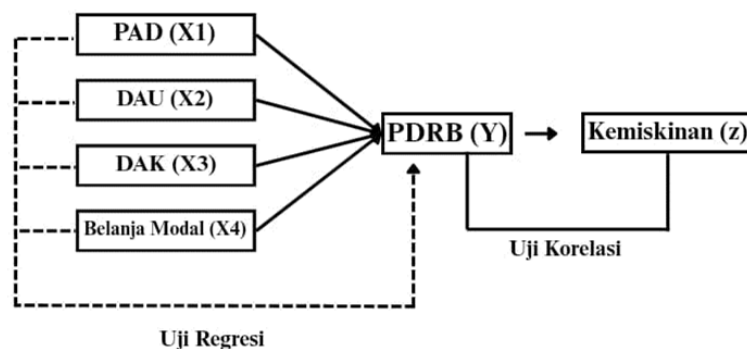
		Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022.”		signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.		Provinsi Jawa Tengah.
10.	Delvia Afna, Ratna Husein, Mutia Rahmah, Murtala (2024).	“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap PDRB Di Provinsi Sumatera.”	Independen: DAU, DAK, Pajak Daerah, Belanja Daerah Dependen: PDRB	DAU berpengaruh negative dan signifikan terhadap PDRB, DAU berpengaruh Positif dan signifikan terhadap PDRB, Pajak Daerah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap PDRB, Belanja Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Hasil secara simultan	Penelitian ini menggunakan pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap PDRB.	Penelitian ini terdapat variable Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal mempengaruhi PDRB dan dikorelasikan dengan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.

				menunjukkan bahwa DAU, DAK, Pajak Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB.		
11.	Shovia Diva (2025).	“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Daerah Terhadap PDRB di Provinsi Jambi”	Independen: PAD, DAK, DBH, Belanja Daerah Dependen: PDRB	Hasil secara pasial maupun secara simultan menunjukkan Adanya pengaruh PAD, DAK, DBH, Belanja Daerah terhadap PDRB,	Penelitian ini menggunakan variabel independen PAD dan DAK.	Penelitian ini terdapat variabel DAU dan Belanja Modal serta terdapat variabel korelasi Kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.

12.	Widya Anggraini, Nurlaili, Zulaikah (2026).	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2014-2024”	Independen: PAD dan Belanja Modal Dependen: PDRB	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan. Secara simultan kedua variabel berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.	Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel PAD dan Belanja Modal serta mengkaji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi	Penelitian ini yang menambahkan variabel DAU, DAK, serta kemiskinan dengan PDRB sebagai variabel korelasi.
-----	---	--	---	--	---	--

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian teoretis yang telah dijelaskan, penelitian ini membangun suatu kerangka konseptual keterkaitan antara variabel-variabel dikaji. Variabel independen yang digunakan mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal. Keempat variabel tersebut dianalisis secara parsial maupun secara simultan untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dikorelasikan dengan variabel lain yaitu tingkat kemiskinan. Korelasi tersebut bertujuan untuk menguji sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam peningkatan PDRB mampu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan Teori Pertumbuhan Endogen, Teori Pembangunan Islam, dan Prinsip Maqashid Syariah sebagai landasan normatif yang menekankan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi agar terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kerangka pemikiran penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

— : Parsial

- - - : Simultan

Variabel X : PAD, DAU, DAK, Belanja Modal

Variabel Y : Produk Domestik Regional Bruto

Variabel z : Kemiskinan (Korelasi)

D. Hipotesis

Analisis penelitian dapat dilakukan setelah terbentuknya hipotesis. Berikut hipotesis pada penelitian ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

PAD menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Fenomena ini terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan PAD memungkinkan daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai program-program pembangunan ekonomi yang akan memperkuat modal manusia dan mendorong produktivitas ekonomi lokal. Sejalan dengan pandangan Teori Pertumbuhan Endogen, pemanfaatan PAD secara efektif dapat menciptakan siklus pertumbuhan berkelanjutan, di mana peningkatan aktivitas ekonomi lokal menghasilkan pendapatan daerah yang lebih tinggi, yang kemudian kembali mendukung pembangunan dan mempercepat pertumbuhan dari dalam wilayah itu sendiri. Teori Maqashid Syariah pada prinsip *hifz al-mal* menjelaskan bahwa peningkatan PAD tidak boleh dicapai melalui cara-cara yang merugikan masyarakat. Pajak dan retribusi daerah harus diterapkan

secara adil dan tidak memberatkan kelompok ekonomi lemah. Jika pemerintah daerah meningkatkan PAD melalui pungutan yang berlebihan, maka hal tersebut dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam (Hatmaka, 2024).

Berdasarkan penelitian dari Istiqamah et al. (2022) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep” menunjukkan bahwa PAD menunjukkan pengaruh signifikan bersifat positif terhadap PDRB. Sejalan dengan penelitian Maisarah & Anwar (2023) membuktikan kenaikan PAD berpotensi menghasilkan dampak terhadap PDRB. Berdasarkan penjelasan tersebut tersusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dipandang sebagai instrumen yang memperkuat kapasitas daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dari dalam sistem ekonomi. Teori Pertumbuhan Endogen menekankan bahwa pertumbuhan berkelanjutan bergantung pada investasi dalam faktor-faktor produktif yang bisa melalui DAU. Pemerintah daerah memperoleh ruang fiskal untuk membiayai sektor-sektor strategis yang mendorong peningkatan efisiensi ekonomi dan kemampuan daerah untuk menghasilkan nilai tambah secara mandiri (Wahyuningsih, 2018). Teori pembangunan Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya

secara efektif. Pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada kegiatan produktif akan mendorong peningkatan produksi, konsumsi, dan investasi. Konsep ini sejalan dengan DAU sebagai sumber pendanaan yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah daerah mampu melaksanakan pembangunan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (Miskiyah et al., 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Gulo (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara” Menemukan bahwa DAU menyumbang kontribusi yang signifikan dan bersifat positif terhadap peningkatan PDRB. Hal tersebut mengarah pada kesimpulan mengindikasikan peningkatan DAU secara konsisten mempengaruhi peningkatan PDRB di wilayah terkait. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaizafun et al. (2024) menemukan Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan uraian tersebut tersusun hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, namun juga oleh faktor internal seperti akumulasi modal fisik, modal manusia, serta kebijakan publik yang mampu meningkatkan

produktivitas jangka panjang. Kebijakan publik DAK berfungsi sebagai instrumen fiskal dalam mendanai kegiatan pembangunan tertentu di daerah terutama pada sektor-sektor strategis. Investasi pemerintah dalam bentuk DAK dapat memperkuat kapasitas produksi daerah melalui peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan output regional yang tercermin dalam PDRB. Teori Pembangunan Islam Ibnu Khaldun menjelaskan pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada pembangunan sektor-sektor produktif dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. DAK dipandang sebagai instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor produktif (Miskiyah et al., 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Murti et al. (2023) yang berjudul “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Hubungannya dengan Kemiskinan di Kota Jambi” menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat positif terhadap PDRB. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diva (2025) membuktikan bahwa kenaikan DAK akan berdampak juga pada kenaikan PDRB. Berdasarkan uraian tersebut tersusun hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus Fisik berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

4. Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja Modal diarahkan khusus untuk kepemilikan dan pembangunan aset tetap serta jenis aset lain yang memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang, yaitu melampaui

satu periode akuntansi atau umumnya lebih dari satu tahun. Belanja Modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat fondasi produktivitas masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Teori Pertumbuhan Endogen yang menekankan pentingnya investasi produktif dalam menciptakan pertumbuhan berkelanjutan. Teori Maqashid Syariah pada prinsip *hifz al-mal* menekankan pentingnya pengelolaan dan pengembangan sumber daya ekonomi secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Belanja Modal diharapkan dapat mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah (Hidayat et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian dari Hakim et al. (2019) berjudul “Pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja Dan PAD Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah” menunjukkan Belanja Modal terbukti memberikan pengaruh yang nyata bersifat positif terhadap PDRB, yang mengindikasikan bahwa optimalisasi pendistribusian Belanja Modal yang dijalankan oleh pemerintah daerah diyakini mampu memberikan dorongan yang nyata terhadap pertumbuhan nilai PDRB. Hal ini sejalan dengan penelitian Ama & Renggo (2022) menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara Belanja Modal dengan PDRB. Berdasarkan uraian tersebut tersusun hipotesis sebagai berikut:

H₄: Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

5. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Pembangunan ekonomi daerah tidak terlepas dari peran penting kebijakan fiskal yang mencakup PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal. keberadaan PAD sebagai komponen penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal serta merepresentasikan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. DAU dan DAK dapat membantu daerah yang memiliki keterbatasan PAD tetap mampu mendanai beragam program pembangunan, penyelenggaraan layanan publik, serta pembiayaan investasi infrastruktur yang strategis. Belanja Modal dialokasikan untuk pengadaan infrastruktur dan aset tetap, dimana ketersediaan infrastruktur yang memadai di suatu daerah mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta menarik masuknya investasi swasta, yang pada akhirnya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan hasil penelitian dari Murti et al. (2023) dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap PDRB Dan Hubungannya dengan Kemiskinan di Kota Jambi” menyatakan PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terbukti secara simultan memberikan pengaruh yang berarti terhadap PDRB. Ketika PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal dikelola dan digunakan dengan optimal serta bersinergi, hasilnya adalah peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin melalui naiknya PDRB. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diva (2025) menunjukkan bahwa PAD, DAK, DBH, dan Belanja Daerah berpengaruh

signifikan terhadap PDRB. Berdasarkan uraian tersebut tersusun hipotesis sebagai berikut:

H_s: DAU, DAK, PAD, Belanja Modal berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

6. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto dengan Kemiskinan.

Peningkatan PDRB sebagai hasil dari pengelolaan DAU, optimalisasi PAD, dan Belanja Modal yang efektif, berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika PDRB daerah meningkat, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Sejalan dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen dimana pertumbuhan ekonomi internal mendorong penurunan kemiskinan. Teori Pembangunan Islam Ibnu Khaldun memberikan landasan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan PDRB berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Ketika perekonomian berkembang, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber penghidupan sehingga tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan dapat berkurang (Hermawan & Bahjatulloh, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian dari Murti et al. (2023) dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap PDRB Dan Hubungannya dengan Kemiskinan di Kota Jambi” menyatakan bahwa PDRB menunjukkan keterkaitan yang signifikan terhadap kemiskinan yang berarti terdapat hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi daerah (diukur melalui PDRB) dan penurunan kemiskinan. Sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Algifari & Andrini (2024) bahwa adanya hubungan yang signifikan antara PDRB dan Kemiskinan. Peningkatan PDRB yang diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan dapat menjadi faktor penting sebagai upaya menekan kemiskinan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan uraian tersebut tersusun hipotesis sebagai berikut:

H₀: Analisis Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Kemiskinan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mengacu pada sejumlah laporan publik sebagai sumber utama. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan kondisi yang sedang berlangsung pada suatu kelompok manusia, objek, situasi tertentu, sistem pemikiran, atau peristiwa yang terjadi saat ini (Novianti et al., 2022). Data yang dihimpun kemudian dianalisis serta diolah untuk menghasilkan informasi yang terorganisasi dan lebih mudah dipahami. Proses pengolahan data dalam penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak pendukung yaitu Eviews 13.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, hal ini karena data yang dianalisis berbentuk angka atau nilai numerik. Sugiono (2006) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian yang baku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan tersebut ditujukan untuk untuk mengkaji pengaruh sekaligus korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari instansi resmi.

C. Setting Penelitian

Penelitian ini ditunjukkan dalam bentuk data panel yang meliputi periode empat tahun dari 2021 hingga 2024. Rentang waktu tersebut relatif singkat sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan kondisi jangka pendek. Data penelitian ini meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto, dan Kemiskinan, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Alokasi TKDD DJPK Kemenkeu. Penelitian ini berfokus pada 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

D. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup semua kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada seluruh periode waktu yang ditetapkan. Adapun sampel penelitian terdiri dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meliputi 29 kabupaten dan 6 kota (BPS, 2024) dengan cakupan rentang waktu antara tahun 2021 hingga 2024. Total jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 140 unit observasi.

E. Variabel Penelitian

Penelitian ini mengkaji dua kelompok variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun uraian mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Variabel	Rumus	Jenis Data	Sumber Data
1.	Pendapatan Asli Daerah (X_1)	Pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah itu	$PAD = \sum \text{Komponen PAD}$	Rasio	(DJPK, 2025)

		sendiri untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.			
2.	Dana Alokasi Umum (X_2)	Pelimpahan Dana yang berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.	$DAU = \text{Alokasi Dasar} + (\text{Celah Fiskal} \times \text{Proporsi})$	Rasio	(DJPk, 2024)
3.	Dana Alokasi Khusus (X_3)	Dana dari APBN untuk membiayai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional di daerah.	$DAK_i = B + (K \times I)$	Rasio	(DJPk, 2024)
4.	Belanja Modal (X_4)	Belanja pemerintah daerah dialokasikan untuk membiayai kepemilikan atau pengadaan aset tetap..	$BM = \Delta AT + D$	Rasio	(DJPk, 2025)
5.	Produk Domestik Regional Bruto (Y)	Alat yang digunakan untuk menilai jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah pada jangka waktu tertentu.	$PDRB = C + I + G + (X - M)$	Rasio	(BPS, 2025)

6.	Kemiskinan (z)	Suatu kondisi ketika individu tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.	$P0 = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Total penduduk}} \times 100\% \right)$	Interval	(BPS, 2024a)
----	----------------	--	--	----------	--------------

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana dalam memperoleh data. Sugiono (2006) menjelaskan bahwa data tersebut berupa dokumentasi dari jurnal-jurnal ilmiah, laporan-laporan publik, dan buku. Hal ini dokumen terkait tentang PAD, DAU, DAK, Belanja Modal, PDRB, dan Kemiskinan, serta hal-hal lain yang terkait dengan judul penelitian

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pemilihan Model Regresi

Analisis regresi memiliki pendekatan data panel dengan 3 metode menganalisis variabel bebas dengan variabel terikat yaitu:

a Model CEM (Common Effect Model)

CEM merupakan metode yang memadukan data individu secara lintas waktu (*time series*) dan antar unit (*cross section*). Model ini berasumsi bahwa masing-masing individu mempunyai kesamaan karakteristik, Estimasi pada model ini dilaksanakan dengan menerapkan metode *Ordinary Least Squares* (Ghozali & Ratmono, 2017).

b Model FEM (Fixed Effect Model)

FEM merupakan suatu pendekatan analisis yang digunakan untuk mengkaji hubungan antarindividu, dengan asumsi bahwa koefisien variabel independen bersifat konstan baik antarindividu maupun sepanjang periode waktu. Model ini mampu mengakomodasi karakteristik khusus dari masing-masing individu yang tidak dapat diamati secara langsung (Ghozali & Ratmono, 2017).

c Model REM (Random Effect Model)

REM merupakan model yang mengasumsikan perbedaan individu sehingga nilai intersep pada model REM bersifat random. REM juga dapat disimpulkan sebagai suatu pendekatan yang beranggapan bahwa nilai rata-rata intersep antarindividu pada cross section tidak berbeda (Ghozali & Ratmono, 2017).

2. Penentuan Model Terbaik

Penentuan model estimasi pada data panel dilakukan melalui serangkaian pengujian statistik. Secara umum terdapat tiga jenis uji yang menjadi dasar dalam proses ini, yang masing-masing berfungsi untuk memastikan kesesuaian serta keandalan model yang digunakan. Beberapa uji yang perlu dilakukan sebagai berikut:

a Uji Chow

Uji Chow diterapkan untuk mengidentifikasi model estimasi data panel yang paling sesuai, dengan menilai kelayakan penggunaan Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan Common Effect Model (CEM).

Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menilai apakah perbedaan antar individu atau unit cross-section perlu diperhitungkan dalam model. Jika Nilai probabilitas *cross-section* F lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar individu atau unit pengamatan., sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Common Effect Model (CEM) sedangkan apabila Nilai probabilitas *cross-section* F lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka Fixed Effect Model (FEM) dianggap lebih sesuai digunakan (Basuki & Prawoto, 2016).

b Uji Hausman

Uji Hausman diaplikasikan dalam analisis data panel guna menilai kelayakan model estimasi yang paling tepat, dengan membandingkan Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan antar satuan pengamatan lebih sesuai diasumsikan sebagai efek tetap yang ditangkap oleh FEM atau sebagai efek acak yang diakomodasi oleh REM, sehingga hasil estimasi dapat mencerminkan karakteristik data secara lebih akurat. Jika Nilai probabilitas *chi-square* lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, yang berarti Random Effect Model (REM) lebih tepat digunakan. Sebaliknya apabila Nilai probabilitas *chi-square* lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka model Fixed Effect Model (FEM) lebih sesuai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antar individu

berhubungan secara signifikan dengan variabel independen (Basuki & Prawoto, 2016).

c Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier diterapkan ketika hasil uji sebelumnya menimbulkan perbedaan arah, yaitu Uji Chow mengindikasikan penggunaan CEM, sedangkan Uji Hausman menunjukkan bahwa model yang lebih tepat adalah REM. Apabila kedua pengujian menunjukkan kesesuaian dengan rekomendasi FEM sebagai model yang paling tepat, maka pelaksanaan Uji Lagrange Multiplier tidak diperlukan. Uji LM berfungsi untuk menguji apakah pendekatan REM memberikan hasil estimasi yang lebih akurat daripada CEM dalam konteks data panel. Jika Nilai probabilitas Breusch–Pagas lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar unit individu, sehingga model yang tepat digunakan adalah Common Effect Model (CEM). Sebaliknya jika Nilai probabilitas Breusch–Pagas lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka model yang sesuai untuk digunakan adalah Random Effect Model (REM) (Basuki & Prawoto, 2016).

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan model regresi memenuhi syarat sebagai Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Berikut uji asumsi klasik sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk menilai kesesuaian data variabel dependen maupun independen terhadap distribusi normal dalam model regresi. Pengujian ini umumnya mengaplikasikan model Jarque-Bera Test. Penentuan keputusan menggunakan kriteria normal nilai probabilitas *Jarque-Bera* $> 0,05$, dan sebaliknya dikategorikan tidak normal jika nilai tersebut berada $< 0,05$ (Hadya et al., 2017). Pada data panel uji normalitas tidak sebagai prasyarat wajib dalam analisis regresi data panel karena tidak termasuk dalam asumsi Gauss–Markov yang menyatakan bahwa estimator Ordinary Least Squares (OLS) akan bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Pelanggaran terhadap asumsi normalitas tidak menyebabkan estimator menjadi bias maupun kehilangan efisiensinya, sehingga hasil estimasi tetap valid meskipun distribusi error tidak normal (Basuki, 2014).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan yang signifikan antar variabel bebas dalam model regresi. Adanya keterkaitan yang kuat di antara variabel bebas dapat menimbulkan distorsi sehingga hasil estimasi menjadi kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pengambilan Keputusan dalam uji multikolinearitas yaitu apabila skor korelasi > 0.80 menandakan adanya masalah multikolinearitas, namun jika skor korelasi < 0.80 menandakan tidak terdapat masalah multikolinearitas (Basuki, 2014).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk menentukan varians residual dalam model regresi memiliki sifat konstan (homoskedastisitas) atau menunjukkan adanya perbedaan varian (heteroskedastisitas). Kelayakan suatu model regresi ditentukan salah satunya oleh terpenuhinya asumsi homoskedastisitas. Pengambilan keputusan dalam uji didasarkan pada nilai probabilitas $\text{Chi-square} > 0,05$ maka residual dianggap homoskedastisitas, sedangkan nilai $\text{Prob. Chi-square} < 0,05$ menunjukkan adanya heteroskedastisitas (Ghozali & Ratmono, 2017).

4. Uji Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Indartini & Mutmainah, 2024). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it}$$

Y : PDRB

α : konstanta

X_{1it} : DAU

X_{2it} : DAK

X_{3it} : PAD

X_{4it} : Belanja Modal

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: koefisien regresi pada Variabel X_1, X_2, X_3, X_4

ε : error term

i : cross section

t : times series

5. Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Uji parsial digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara mengujinya secara terpisah dalam kerangka regresi. Uji parsial dilaksanakan dengan cara membandingkan nilai probabilitas t-statistik terhadap taraf signifikansi yang ditentukan, biasanya sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas t-statistik berada $<0,05$, variabel independen yang diuji dinyatakan memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Saniah & Murtala, 2023).

b. Uji Simultan

Uji F dimanfaatkan untuk mengevaluasi sejauh mana semua variabel bebas secara simultan memengaruhi variabel terikat dalam suatu model regresi dengan menggunakan distribusi F pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$. Apabila nilai probabilitas yang diperoleh $>0,05$, maka variabel bebas secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas $\leq 0,05$, maka

variabel bebas memberikan pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Saniah & Murtala, 2023).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-Square adalah indikator statistik dalam analisis regresi yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana model mampu menggambarkan perubahan atau variasi yang ada pada data. Koefisien determinasi ditentukan dalam kisaran $0 < R^2 < 1$, Apabila nilai r-square mendekati 1, artinya variabel independen sangat berpengaruh terhadap variabel dependen, Keduanya dapat menjelaskan hampir seluruh perubahan yang terjadi pada variabel dependen (Saniah & Murtala, 2023).

6. Uji Korelasi Spearman

Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan linier antara satu variabel dengan variabel lainnya. Analisis korelasi memiliki tujuan membantu mengetahui apakah perubahan pada suatu variabel berkaitan dengan perubahan pada variabel lain serta menunjukkan tingkat keeratan hubungan tersebut. Korelasi Rank Spearman dilakukan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel (Pamungkasih, 2023). Penggunaan uji korelasi Rank Spearman dalam penelitian memiliki kelebihan yaitu tidak mensyaratkan data berdistribusi normal, dapat digunakan pada data yang berbentuk peringkat maupun data yang tidak memenuhi asumsi parametrik. Uji Rank Spearman mampu mengidentifikasi kekuatan dan arah hubungan antarvariabel yang bersifat

monotonik sehingga sesuai digunakan untuk menganalisis hubungan antara PDRB dan tingkat kemiskinan pada penelitian ini.

Metode Rank Spearman diterapkan pada data yang memiliki skala minimal ordinal atau data yang disusun dalam bentuk peringkat (ranking). Uji korelasi Spearman dapat digunakan pada variabel dengan skala yang berbeda. Tahap pertama dalam menghitung korelasi Rank Spearman adalah menyusun data dalam bentuk peringkat dengan cara mengurutkannya, baik dari nilai yang paling kecil hingga yang paling besar maupun sebaliknya, pada variabel dependen (Anandari, 2022). Formula untuk menghitung korelasi Rank Spearman adalah sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

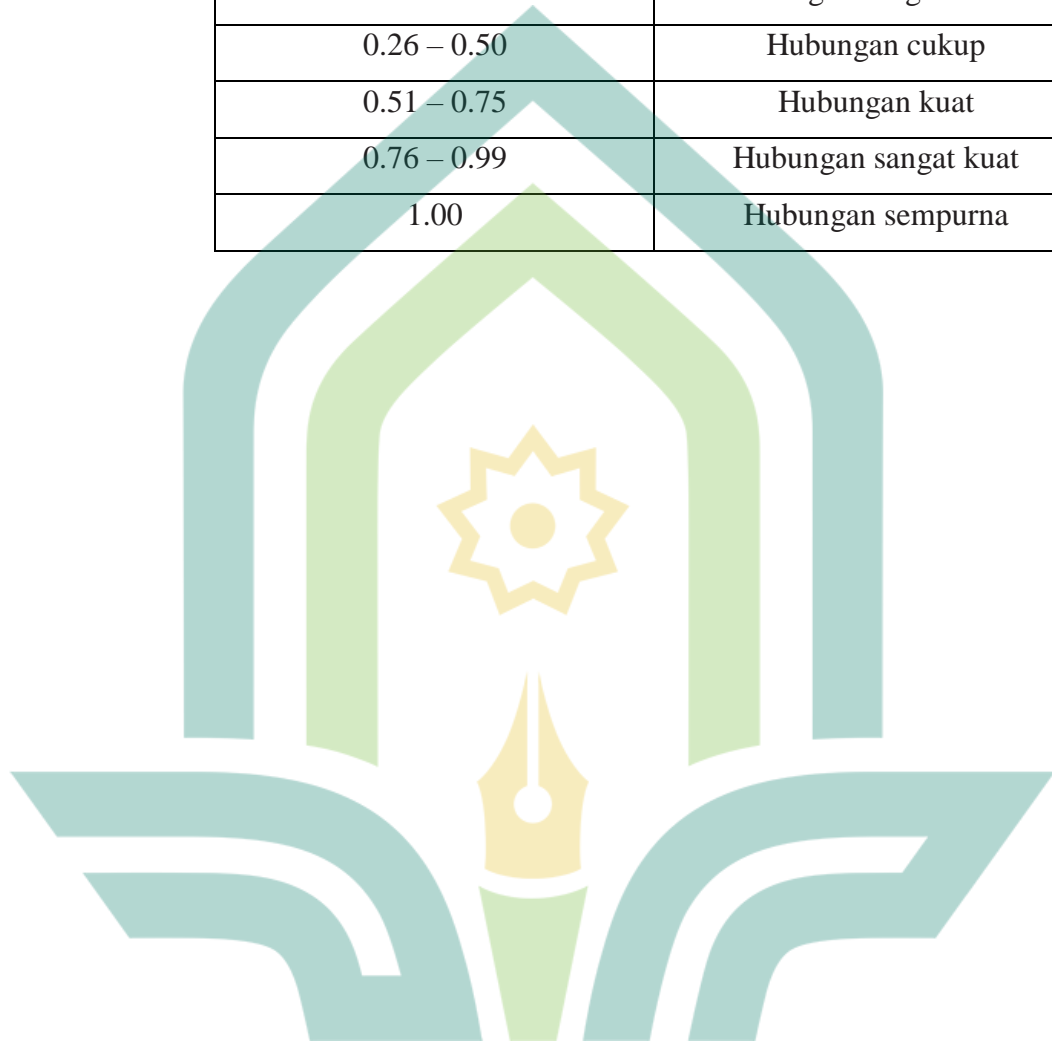
d = perbedaan rangking

n = banyaknya observasi

Tingkat kekuatan hubungan antar variabel dapat ditentukan dari hasil pengujian dengan melihat pada nilai koefisien korelasi. Kriteria tingkat kekuatan korelasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Kekuatan Korelasi

Nilai koefisien korelasi	Kriteria korelasi
0.00 – 0.25	Hubungan sangat lemah
0.26 – 0.50	Hubungan cukup
0.51 – 0.75	Hubungan kuat
0.76 – 0.99	Hubungan sangat kuat
1.00	Hubungan sempurna



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Penelitian ini menganalisis 5 variabel, terdiri dari variabel dependen yaitu produk domestik regional bruto yang direpresentasikan pada data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dan variabel independent yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal, terdapat variabel kemiskinan untuk dikorelasikan dengan variabel dependen. Penelitian ini mencakup periode 2021-2024 untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antar variabel di Jawa Tengah. Berikut Gambaran umum mengenai masing-masing variable dalam penelitian:

1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kota provinsi Jawa Tengah terletak di Kota Semarang sebagai pusat ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai 37.892.283 jiwa menunjukkan pertumbuhan signifikan dari tahun 2021 yang berjumlah 36.742.501 jiwa. Secara geografis, Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, serta Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Luas wilayahnya mencapai 32.800,69 km² yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota.

Tabel 4.1 Daftar Nama Kabupaten/kota Di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Cilacap
2.	Kabupaten Banyumas
3.	Kabupaten Purbalingga
4.	Kabupaten Banjarnegara
5.	Kabupaten Kebumen
6.	Kabupaten Purworejo
7.	Kabupaten Wonosobo
8.	Kabupaten Magelang
9.	Kabupaten Boyolali
10.	Kabupaten Klaten
11.	Kabupaten Sukoharjo
12.	Kabupaten Wonogiri
13.	Kabupaten Karanganyar
14.	Kabupaten Sragen
15.	Kabupaten Grobogan
16.	Kabupaten Blora
17.	Kabupaten Rembang
18.	Kabupaten Pati
19.	Kabupaten Kudus
20.	Kabupaten Jepara
21.	Kabupaten Demak
22.	Kabupaten Semarang
23.	Kabupaten Temanggung
24.	Kabupaten Kendal
25.	Kabupaten Batang
26.	Kabupaten Pekalongan
27.	Kabupaten Pemalang
28.	Kabupaten Tegal
29.	Kabupaten Brebes
30.	Kota Magelang
31.	Kota Surakarta
32.	Kota Salatiga
33.	Kota Semarang
34.	Kota Pekalongan
35.	Kota Tegal

2. Gambaran Umum Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah Tahun 2021-2024.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama dalam mengukur kinerja perekonomian daerah, termasuk pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 wilayah administratif. Kondisi perekonomian kabupaten/kota di Jawa Tengah ditahun 2021 mulai mengalami pemulihan setelah tekanan ekonomi pada tahun 2020. Aktivitas produksi di berbagai sektor mulai meningkat, meskipun masih terbatas akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Struktur ekonomi sebagian besar kabupaten masih didominasi oleh sektor pertanian, terutama di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, dan Kebumen, sementara daerah perkotaan dan kawasan industri seperti Kota Semarang, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Cilacap menunjukkan kontribusi PDRB yang lebih tinggi karena ditopang oleh sektor industri.

Pada tahun 2022 pengolahan dan perdagangan. peningkatan PDRB yang lebih kuat di hampir seluruh kabupaten/kota karena didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional, peningkatan mobilitas masyarakat, serta mulai pulihnya sektor-sektor utama seperti industri, perdagangan, dan jasa. Beberapa daerah bahkan mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, seperti Kabupaten Boyolali yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah semakin stabil dan merata. Struktur ekonomi mulai menunjukkan pergeseran dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa), terutama di wilayah perkotaan dan

kawasan strategis. Kota Semarang sebagai pusat ekonomi provinsi tetap menjadi penyumbang terbesar PDRB, diikuti oleh kabupaten industri seperti Cilacap dan Kudus. Pada tahun 2024 PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah diperkirakan terus mengalami peningkatan seiring dengan stabilitas ekonomi dan peningkatan aktivitas investasi. Pembangunan infrastruktur, peningkatan daya beli masyarakat, serta penguatan sektor unggulan daerah menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor industri pengolahan masih menjadi tulang punggung perekonomian di sebagian besar wilayah, sementara sektor jasa mengalami perkembangan pesat terutama di daerah perkotaan.

3. Gambaran Umum Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal di Jawa Tengah Tahun 2021-2024.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal yang merupakan komponen penting mencerminkan kapasitas fiskal serta arah kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2021 kondisi keuangan daerah di kabupaten/kota Jawa Tengah masih berada dalam fase pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sebagian besar wilayah masih relatif rendah karena aktivitas ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kota-kota besar seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta mulai menunjukkan peningkatan PAD yang lebih baik karena didukung oleh sektor perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi perkotaan yang lebih cepat pulih. Struktur pendapatan daerah seperti DAU masih menjadi komponen terbesar, terutama

bagi kabupaten yang memiliki keterbatasan PAD, sehingga menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. DAK Fisik, mulai diarahkan kembali untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di berbagai daerah. Pada tahun 2021 realisasi DAK di beberapa daerah masih belum optimal karena kendala administratif dan teknis pelaksanaan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi alokasi Belanja Modal yang pada tahun 2021 masih relatif terbatas dan belum merata antar wilayah.

Pada tahun 2022 kondisi fiskal kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. PAD mulai meningkat di hampir seluruh daerah seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi. Kota Semarang tetap menjadi daerah dengan PAD tertinggi. DAU tetap mendominasi pendapatan daerah, namun penggunaannya mulai lebih diarahkan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif. Realisasi DAK mengalami peningkatan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda pada tahun sebelumnya. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan Belanja Modal di berbagai kabupaten/kota.

Pada tahun 2023 struktur keuangan daerah di Jawa Tengah semakin menunjukkan penguatan. PAD terus mengalami peningkatan, terutama di daerah perkotaan dan wilayah penyangga seperti Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali yang mengalami perkembangan pesat akibat kedekatannya dengan pusat ekonomi. Keuangan daerah masih bergantung pada DAU yang terlihat masih cukup tinggi di sebagian besar kabupaten. Realisasi DAK yang lebih optimal mendorong peningkatan Belanja Modal, yang tercermin dari meningkatnya pembangunan jalan, fasilitas publik, dan

sarana pelayanan masyarakat. Kabupaten industri seperti Kendal dan Demak juga mulai meningkatkan Belanja Modal untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri dan investasi.

Pada tahun 2024 kondisi fiskal kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan tren yang semakin stabil dan positif. PAD terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan optimalisasi pemungutan pajak serta retribusi. Kota Semarang dan Surakarta tetap menjadi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi, sementara kabupaten agraris masih bergantung pada dana transfer seperti DAU dan DAK. Kabupaten dengan PAD rendah, yang menunjukkan bahwa ketimpangan kapasitas fiskal antar wilayah masih menjadi tantangan utama. DAK semakin difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mendorong peningkatan Belanja Modal yang lebih signifikan, terutama di daerah yang sedang berkembang dan wilayah penyangga perkotaan. Secara keseluruhan, perkembangan DAU, DAK, PAD, dan Belanja Modal di kabupaten/kota Jawa Tengah selama periode 2021–2024 menunjukkan PAD mengalami peningkatan secara bertahap, namun kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan dana transfer pusat. DAU tetap menjadi komponen dominan dalam pendapatan daerah, yang mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal. DAK berperan strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Belanja Modal menunjukkan tren peningkatan sebagai indikasi adanya pergeseran kebijakan ke arah pembangunan jangka Panjang.

4. Gambaran Umum Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2021-2024.

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2021 hingga 2024 menggambarkan dinamika yang cukup kompleks. Kondisi kemiskinan di tahun 2021 masih relatif tinggi sebagai dampak lanjutan dari pandemi COVID-19. Pada daerah-daerah seperti Kabupaten Kebumen, Wonosobo, dan Banjarnegara terlihat menonjol sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Kondisi kemiskinan pada tahun 2022 mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi. Pemulihan ini tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah, terlihat Kabupaten Kebumen dengan persentase penduduk miskin yang tinggi, diikuti oleh Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Penurunan kemiskinan juga terlihat di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif.

Kondisi tren penurunan kemiskinan di tahun 2023 menjadi lebih jelas terlihat, terutama di wilayah perkotaan dan daerah yang memiliki basis industri atau perdagangan yang kuat seperti Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Magelang. Kota-kota tersebut secara konsisten menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan kabupaten. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan lapangan kerja di sektor formal, akses pendidikan yang lebih baik, serta infrastruktur yang lebih memadai. Pada kabupaten yang berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi seperti Sukoharjo dan Karanganyar juga memperoleh dampak positif dari efek aglomerasi wilayah Solo Raya. Wilayah pesisir utara seperti Kabupaten Kudus

dan Jepara menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik karena didukung oleh sektor industri, khususnya industri rokok dan mebel. Tahun 2023 aktivitas ekonomi yang lebih dinamis terlihat di kedua daerah tersebut yang memiliki kontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap.

Pada tahun 2024 kemiskinan di Jawa Tengah secara umum terus menurun, namun pola ketimpangan antarwilayah masih tetap terlihat jelas. Kabupaten tetap mendominasi kelompok wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sedangkan kota cenderung berada pada kategori rendah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kabupaten Pemalang, Brebes, dan Tegal masih menghadapi tantangan dalam mengurangi kemiskinan meskipun memiliki potensi ekonomi, karena sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah. Secara keseluruhan, kemiskinan di Jawa Tengah selama 2021–2024 memperlihatkan bahwa faktor lokasi geografis, struktur ekonomi, dan tingkat pembangunan manusia sangat menentukan kondisi kemiskinan suatu daerah.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif yaitu pengujian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai mean (rata-rata), maksimal, minimal, dan standar deviasi pada sebuah data. Berikut hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	21.42698	30.37252	9.721034	16.82033	164.5235
Median	20.42879	30.55244	9.957019	16.48367	152.8022
Maximum	56.22881	38.39665	15.20471	34.50380	413.4582
Minimum	15.52288	20.23931	3.941166	8.671344	80.70867
Std. Dev	6.134322	4.230110	2.281700	4.218339	60.13730
Observations	140	140	140	140	140

Sumber: Eviews 13, diolah 2026

Berdasarkan tabel 3.1 dengan total data observation yang diolah sebanyak 140 data. Berikut ini merupakan interpretasi hasil statistik deskriptif variabel independent dan variabel dependen pada penelitian ini yaitu:

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) mempunyai nilai minimum 15.52288 hal tersebut menunjukkan bahwa nilai terkecil yang terdapat pada Pendapatan Asli Daerah dengan nilai tersebut yang didapat dari Kota Salatiga tahun 2022. Hasil untuk nilai maximum 56.22881 menunjukkan bahwa nilai terbesar yang didapat pada Pendapatan Asli Daerah dengan nilai tersebut yang didapatkan dari Kota Semarang tahun 2024. Pada hasil untuk nilai mean (rata-rata) 21.42698, median sebesar 20.42879, dan standar deviasinya adalah 6.134322.
- b. Variabel Dana Alokasi Umum (X2) mempunyai nilai minimum 20.23931 hal tersebut menunjukkan bahwa nilai terkecil yang terdapat pada Dana Alokasi Umum dengan nilai tersebut yang didapat dari Kota Magelang tahun 2022. Hasil untuk nilai maximum 38.39665 menunjukkan bahwa nilai terbesar yang didapat pada Dana Alokasi Umum dengan nilai tersebut yang didapatkan dari Kabupaten Brebes tahun 2024. Pada hasil untuk nilai mean (rata-rata)

30.37252, median sebesar 30.55244, dan standar deviasinya adalah 4.230110.

- c. Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) mempunyai nilai minimum 3.941166 hal tersebut menunjukkan bahwa nilai terkecil yang terdapat pada Dana Alokasi Khusus dengan nilai tersebut yang didapat dari Kota Semarang tahun 2024. Hasil untuk nilai maximum 15.20471 menunjukkan bahwa nilai terbesar yang didapat pada Dana Alokasi Khusus dengan nilai tersebut yang didapatkan dari Kabupaten Karanganyar tahun 2024. Pada hasil untuk nilai mean (rata-rata) 9.721034, median sebesar 9.957019, dan standar deviasinya adalah 2.281700.
- d. Variabel Belanja Modal (X4) mempunyai nilai minimum 8.671344 hal tersebut menunjukkan bahwa nilai terkecil yang terdapat pada Belanja Modal dengan nilai tersebut yang didapat dari Kota Salatiga tahun 2022. Hasil untuk nilai maximum 34.50380 menunjukkan bahwa nilai terbesar yang didapat pada Belanja Modal dengan nilai tersebut yang didapatkan dari Kota Semarang tahun 2024. Pada hasil untuk nilai mean (rata-rata) 16.82033, median sebesar 16.48367, dan standar deviasinya adalah 4.218339.
- e. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (Y) mempunyai nilai minimum 80.70867 hal tersebut menunjukkan bahwa nilai terkecil yang terdapat pada Produk Domestik Regional Bruto dengan nilai tersebut yang didapat dari Kota Magelang tahun 2021. Hasil untuk nilai maximum 413.4582 menunjukkan bahwa nilai terbesar yang didapat pada Produk Domestik Regional Bruto dengan nilai tersebut yang didapatkan dari Kota Semarang

tahun 2024. Pada hasil untuk nilai mean (rata-rata) 164.5235, median sebesar 152.8022, dan standar deviasinya adalah 60.13730.

C. Analisis Data Penelitian

1. Penentuan Model Estimasi Regresi Linier Berganda

Pada modal regresi data panel terdapat tiga model yang bisa digunakan yaitu CEM, FEM, dan REM. Pemilihan model diantara tiga model tersebut dapat dilakukan dengan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Langrange Multiplier. Berikut aturan pemilihan model berdasarkan hasil uji.

Tabel 4.3 Ketentuan Pemilihan Model Regresi

Pengujian	Hasil	Kesimpulan
Uji Chow	Prob. > 0.05	CEM
	Prob. < 0.05	FEM
Uji Hausman	Prob. > 0.05	REM
	Prob. < 0.05	FEM
Uji Langrange Multiplier	Prob. > 0.05	CEM
	Prob. < 0.05	REM

a. Uji Chow

Pengujian ini digunakan untuk menentukan model mana yang lebih baik digunakan dalam model regresi antara CEM dan FEM.

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	187.101724	(34,101)	0.0000
Cross-section Chi-square	582.210244	34	0.0000

Sumber: Eviews13, diolah 2026

Berdasarkan hasil uji chow yang dilakukan menunjukkan hasil nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$, maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Models (FEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang terbaik untuk regresi antara FEM dan REM.

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	38.231847	4	0.0000

Sumber: *Eviews13, data diolah 2026*

Berdasarkan hasil pengujian diatas, menunjukkan hasil nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$. Hal tersebut menentukan bahwa model terbaik untuk penelitian ini adalah FEM.

c. Uji Lagrange Multiplier

Pengujian lagrange multiplier untuk melihat model terbaik antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM). Berdasarkan uji chow dan uji hausman berhasil dipilih model terbaik untuk pengujian yaitu Fixed Effect Model (FEM), sehingga pengujian lagrange multiplier tidak perlu dilakukan.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antar variabel independent dalam model regresi dianggap optimal jika tidak terjadi hubungan antar variabel independent. Standar dalam uji multikolinearitas jika nilai koefisien korelasi harus lebih kecil dari 0.80 supaya terhindar dari gejala multikolinearitas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1_PAD	X2_DAU	X3_DAK	X4_BM
X1_PAD	1	0.419453	-0.027724	0.772463
X2_DAU	0.419453	1	0.469409	0.571336
X3_DAK	-0.027724	0.469409	1	0.264073
X4_BM	0.772463	0.571336	0.264073	1

Sumber: Eviews13, data diolah 2026

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa besaran korelasi diantara variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan Dana Alokasi Umum (X2) yaitu $0.419 < 0.80$, kemudian Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan Dana Alokasi Khusus (X3) yaitu $-0.027 < 0.80$, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan Belanja Modal (X4) yaitu $0.772 > 0.80$, selanjutnya Dana Alokasi Umum (X2) dengan Dana Alokasi Khusus (X3) yaitu $0.469 < 0.80$, selanjutnya Dana Alokasi Umum (X2) dengan Belanja Modal (X4) yaitu $0.571 < 0.80$, kemudian Dana Alokasi Khusus (X3) dengan Belanja Modal (X4) yaitu $0.264 < 0.80$. Berdasarkan penjelasan hasil tersebut secara keseluruhan korelasi antar variabel menunjukkan nilai dibawah signifikansi 0.80 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk memastikan bahwa varians residual dalam model regresi bersifat konstan sehingga hasil estimasi regresi valid dan dapat digunakan untuk pengujian statistik.

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.187686	10.46645	0.304562	0.7613
X1_PAD	0.015050	0.199432	0.075466	0.9400
X2_DAU	-0.083376	0.368268	-0.226402	0.8213
X3_DAK	0.471382	0.123062	3.830450	0.0002
X4_BM	-0.168478	0.122901	-1.370847	0.1735

Sumber: Eviews13, data diolah 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas pada variabel DAK dengan nilai probabilitas $0.0002 < 0.05$, sementara variabel lain memiliki nilai probabilitas > 0.05 sehingga tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Disimpulkan bahwa model regresi masih mengandung gejala heteroskedastisitas, karena terdapat variabel yang memiliki nilai probabilitas di bawah tingkat signifikansi 5%.

Permasalahan heteroskedastisitas tersebut, peneliti menggunakan pendekatan Robust Standard Error White dengan metode diagonal. Penggunaan Robust Standard Error White tidak mengubah nilai koefisien regresi yang dihasilkan, namun hanya memperbaiki estimasi standar error sehingga hasil pengujian statistik seperti uji t dan uji F menjadi lebih akurat dan reliabel (Wijaya et al., 2024).

3. Persamaan Regresi Data Panel.

Pesamaan model regresi dalam data panel terpilih model Fixed Effect Model untuk mengukur pengaruh variabel-variabel bebas pada penelitian terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah.

Tabel 4.8 Hasil Persamaan Regresi dengan Fixed Effect Model.

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-25.61529	20.11032	-1.273739	0.2057
X1_PAD	0.767862	0.473406	1.621995	0.1079
X2_DAU	5.632486	0.729293	7.723217	0.0000
X3_DAK	-1.148401	0.316372	-3.629911	0.0004
X4_BM	0.819048	0.221691	3.694543	0.0004

Sumber: Eviews13, data diolah 2026

Hasil estimasi regresi diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{sqrtPDRB} = -25.61529 + 0.767862(\text{PAD}) + 5.632486(\text{DAU}) - 1.148401(\text{DAK}) + 0.819048 (\text{Belanja Modal}) + \text{eit.}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila variabel DAU, DAK, PAD, Belanja Modal bernilai nol, maka nilai variabel PDRB diperkirakan sebesar -25.61529.
- Nilai koefisien dari Pendapatan Asli Daerah yaitu 0.767862, bernilai positif menjelaskan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan meningkatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto sebesar 1.148401 dengan asumsi variabel DAU, DAK, Belanja Modal nilainya konstan.
- Nilai koefisien dari Dana Alokasi Umum yaitu 5.632486, bernilai positif menjelaskan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan meningkatkan

nilai Produk Domestik Regional Bruto sebesar 5.632486 dengan asumsi variabel DAK, PAD, Belanja Modal nilainya konstan.

- d. Nilai koefisien dari Dana Alokasi Khusus yaitu -1.148401, bernilai negatif menjelaskan bahwa setiap kenaikan DAK sebesar 1% akan menurunkan nilai Produk Domestik Regional Bruto sebesar 1.148401 dengan asumsi variabel DAK, PAD, Belanja Modal nilainya konstan.
- e. Nilai koefisien dari Belanja Modal yaitu 0.819048, bernilai positif menjelaskan bahwa setiap kenaikan Belanja Modal sebesar 1% akan meningkatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0.819048 dengan asumsi variabel DAU, DAK, PAD nilainya konstan.

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menganalisis apakah koefisien regresi dalam penelitian berdampak signifikan atau tidak. Pada penelitian ini, metode yang digunakan mencakup uji t, uji F, serta uji koefisien determinasi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode Robust Standard Error White (Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors) karena pada tahap pengujian asumsi klasik ditemukan adanya indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi. Heteroskedastisitas menyebabkan varians error tidak konstan sehingga dapat mengakibatkan estimasi standar error menjadi bias dan pengujian statistik seperti uji t dan uji F menjadi kurang akurat.

Pendekatan Robust Standard Error White dengan metode diagonal yang berfungsi untuk mengoreksi nilai standar error tanpa mengubah koefisien regresi yang dihasilkan, sehingga estimasi koefisien tetap tidak bias, dan nilai

standar error yang digunakan dalam pengujian statistik menjadi lebih konsisten dan reliabel meskipun terdapat pelanggaran asumsi homoskedastisitas. Penggunaan Robust Standard Error White, hasil pengujian hipotesis yang meliputi uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) tetap dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan penelitian. Oleh karena itu, interpretasi hasil regresi pada penelitian ini didasarkan pada nilai probabilitas yang telah dikoreksi menggunakan metode Robust Standard Error White (diagonal) sehingga kesimpulan yang diperoleh menjadi lebih valid.

a. Uji t

Proses uji t memiliki tujuan untuk mengevaluasi hubungan variabel bebas kepada variabel terikat secara parsial. Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai probability dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05. Jika nilai probabilitas > 0.05 , maka variabel independen tidak punya keterkaitan yang signifikan pada variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas berada < 0.05 , maka terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

Tabel 4.9 Hasil Uji t (Parsial)

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-25.61529	20.11032	-1.273739	0.2057
X1_PAD	0.767862	0.473406	1.621995	0.1079
X2_DAU	5.632486	0.729293	7.723217	0.0000
X3_DAK	-1.148401	0.316372	-3.629911	0.0004
X4_BM	0.819048	0.221691	3.694543	0.0004

Sumber: Eviews13, data diolah 2026

Berdasarkan hasil olah data diatas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Hasil uji T pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) terdapat nilai probabilitas $0.1079 > 0.05$, artinya Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
- 2) Hasil uji T pada variabel Dana Alokasi Umum (X2) terdapat nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$, artinya Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
- 3) Hasil uji T pada variabel Dana Alokasi Khusus (X3) terdapat nilai probabilitas $0.0004 < 0.05$, artinya Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
- 4) Hasil uji T pada variabel Belanja Modal (X4) terdapat nilai probabilitas $0.0004 < 0.05$, artinya Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

b. Uji F (Simultan)

Uji F simultan bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh pada variabel terikatnya.

Tabel 4.10 Hasil Uji F (Simultan)

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996391	Mean dependent var	164.5235
Adjusted R-squared	0.995034	S.D. dependent var	60.13730
S.E. of regression	4.237976	Akaike info criterion	5.956670
Sum squared resid	1814.004	Schwarz criterion	6.776127
Log likelihood	-377.9669	Hannan-Quinn criter.	6.289673
F-statistic	733.8920	Durbin-Watson stat	2.174608
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 13, data diolah 2026

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa F-statistic sebesar 733.8920 dan nilai prob (F-statistic) 0.000000 dibawah nilai sig. 0.05, maka dapat diambil Kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah periode 2021-2024.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pada koefisien determinasi memiliki tujuan untuk menilai sejauh mana variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian. Jika nilai koefisien determinasi mendekati angka satu maka semakin baik variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian.

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.996391	Mean dependent var	164.5235
Adjusted R-squared	0.995034	S.D. dependent var	60.13730
S.E. of regression	4.237976	Akaike info criterion	5.956670
Sum squared resid	1814.004	Schwarz criterion	6.776127
Log likelihood	-377.9669	Hannan-Quinn criter.	6.289673
F-statistic	733.8920	Durbin-Watson stat	2.174608
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews13, data diolah 2026

Berdasarkan hasil pada tabel 3.2 dapat dilihat nilai Adjust R-squared sebesar 0.995034 artinya, variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dapat menjelaskan variabel Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah sebesar 99,50% sedangkan sisanya 0.50% (100-nilai adjusted R square) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dicantumkan dalam penelitian.

5. Uji Korelasi Spearman

Uji korelasi spearman bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan (korelasi) antara dua variabel berdasarkan peringkat (rank) data. Uji korelasi spreaman utnuk melihat apakah hubungan antar variabel bersifat searah (positif) atau berlawanan arah (negatif) serta untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel.

Tabel 4.12 Hasil Uji Korelasi Rank Spearman

	X1_PDRB	X2_Kemiskinan
X1_PDRB	1	-0.072742
X2_Kemiskinan	-0.072742	1

Sumber: Eviews13, data diolah 2026

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman yang telah dilakukan pada data penelitian, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0.072742 antara variabel PDRB dan tingkat kemiskinan. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat negatif atau berlawanan arah. Artinya, ketika Pertumbuhan Ekonomi (yang tercermin dalam PDRB) meningkat, kemiskinan cenderung mengalami penurunan, dan sebaliknya, ketika PDRB menurun, Kemiskinan cenderung meningkat. Berdasarkan data yang diolah kekuatan korelasi sebesar -0.072742 berada sangat dekat dengan nol untuk kategori hubungan lemah. Artinya, meskipun terdapat kecenderungan bahwa peningkatan kemiskinan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kekuatan hubungan ini tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa PDRB sepenuhnya dipengaruhi oleh kemiskinan.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif signifikan pada Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel Pendapatan Asli Daerah senilai $0,1079$ dimana nilai tersebut lebih besar dibanding dengan nilai signifikansi $0,05$. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang ditunjukkan melalui besarnya koefisien determinasi pada variabel PAD senilai 0.76786 yang

artinya setiap 1% kenaikan pada PAD dapat menaikkan Produk Domestik Regional Bruto senilai 5,63248. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah, yang artinya hasil pengujian tidak sejalan dengan hipotesis yang menduga bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah.

Pada Teori Pertumbuhan Endogen menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak secara langsung menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, jika tidak dialokasikan pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah. Pendapatan Asli Daerah seringkali digunakan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan operasional pemerintahan, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan output daerah menjadi terbatas. Apabila setiap tahun PAD secara nominal meningkat, dampaknya terhadap PDRB tidak signifikan karena tidak masuk ke dalam komponen utama yang mendorong pertumbuhan dalam teori endogen (Ma'ruf & Wihastuti, 2008). Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif lebih kecil dibandingkan dana transfer tersebut, sehingga secara statistik pengaruhnya terhadap variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan menjadi tidak meningkat secara signifikan.

Teori Pembangunan Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan negara berasal dari produktivitas masyarakat, dan kekayaan tersebut harus kembali digunakan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat (Zuya et al., 2025). Pemerintah berperan sebagai

fasilitator pembangunan yang harus mengarahkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan kondisi yang mendukung produksi, perdagangan, investasi, dan peningkatan kesejahteraan. PAD tidak secara otomatis akan meningkatkan PDRB apabila pendapatan belum mampu mendorong kegiatan ekonomi yang produktif. Pada konsep Maqashid Syariah terutama prinsip *hifz al-mal* bahwa harta harus dijaga keberadaannya, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menghasilkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Harta publik yang diperoleh melalui PAD merupakan amanah yang harus dikelola secara efektif agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan belum berjalan secara optimal fungsi dari pengembangan harta (*tanmiyah al-mal*) karena pendapatan yang diperoleh belum mampu mendorong peningkatan yang signifikan nilai tambah ekonomi daerah (Ananta & Kurniati, 2025).

Hasil dari penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suparlan et al. (2025) dengan judul penelitian “Analisis pengaruh BUMD, Dana Bagi Hasil (DBH) dan PAD terhadap PDRB di kabupaten kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2024” memiliki hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Gulo (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara” menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan PAD yang terjadi di daerah tidak secara langsung mampu mendorong peningkatan PDRB artinya meskipun PAD mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, kontribusinya terhadap pertumbuhan output ekonomi daerah masih relatif kecil dan belum cukup kuat secara statistik.

Implikasi hasil penelitian menjelaskan bahwa PAD lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin pemerintah dibandingkan untuk belanja produktif yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga peningkatan PAD belum mampu memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah di Jawa Tengah, dimana daerah mungkin memiliki PAD yang tinggi, sedangkan daerah lain masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketimpangan tersebut dapat menyebabkan PAD secara keseluruhan belum mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang tinggi tidak selalu menjamin meningkatnya pertumbuhan ekonomi apabila tidak disertai dengan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan hasil analisis statistik mengindikasikan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan pada Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel Dana Alokasi Umum senilai 0,0000 dimana nilai tersebut lebih kecil dibanding dengan nilai signifikansi 0,05. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki

pengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang ditunjukkan melalui besarnya koefisien determinasi pada variabel DAU senilai 5,63248 yang artinya setiap kenaikan 1% pada DAU dapat menaikkan Produk Domestik Regional Bruto senilai 5,63248. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, sejalan dengan hipotesis yang menduga bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah.

Teori desentralisasi fiskal pada transfer umum seperti DAU diberikan untuk equalization, yaitu menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah agar setiap daerah mampu menyediakan pelayanan publik minimum. Hal tersebut digunakan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah (Bahl & Wallance, 2006). Pemerintah daerah meningkatkan pengeluaran publik yang menggerakkan aktivitas ekonomi melalui pengembangan infrastruktur, layanan publik, serta peningkatan daya beli masyarakat. Ketika daerah yang fiskalnya lemah tetap memiliki dana untuk membangun jalan, pasar, sekolah, puskesmas, irigasi, dan sarana penunjang ekonomi lainnya, maka aktivitas produksi masyarakat menjadi lebih lancar. Petani lebih mudah mendistribusikan hasil panen, pedagang lebih mudah menjalankan usaha, dan masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih baik. Semua ini pada akhirnya menciptakan nilai tambah ekonomi yang masuk ke dalam PDRB.

Teori Pembangunan Islam pandangan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara memiliki peran penting dalam mendorong Pembangunan ekonomi melalui pengeluaran publik yang produktif (Arivah & Iqbal, 2025).

DAU sebagai instrumen transfer fiskal dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga mendorong peningkatan output regional yang tercermin dalam PDRB. Pada Teori Maqashid Syariah khususnya prinsip *hifz al-mal*, DAU mencerminkan pengelolaan harta publik yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian DAU memiliki pengaruh dengan PDRB yang berarti dana publik yang dialokasikan kepada pemerintah daerah telah berfungsi sebagai instrumen pengembangan kekayaan masyarakat dan tercapainya kesejahteraan ekonomi yang menjadi tujuan utama pembangunan dalam Islam (R. Anggraini et al., 2025).

Analisis diatas sejalan dengan konsep penelitian yang dilakukan oleh Zaizafun et al. (2024) Dana Alokasi Umum di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013-2022, berdampak positif pada Produk Domestik Regional Bruto. Analisis tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2022) yang meneliti “pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013–2019” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan DAU akan diikuti dengan peningkatan PDRB, dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa DAU memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah. Hal ini disebabkan DAU digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar dana transfer yang diterima pemerintah daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang mampu meningkatkan output ekonomi daerah. Tingginya DAU menunjukkan pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, keberadaan DAU menjadi penting untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pemerataan ekonomi antar daerah di Jawa Tengah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Berdasarkan output dari analisis data panel, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah memiliki pengaruh negatif signifikan, dimana nilai probabilitasnya dalam uji parsial sebesar 0,0004 dengan nilai kurang dari nilai signifikansi 0,05. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif signifikan dengan Produk Domestik Regional Bruto yang dapat dilihat dari hasil koefisien

determinasi senilai -1.148401 yang artinya bahwa setiap 1% kenaikan Dana Alokasi Khusus dapat menurunkan Produk Domestik Regional Bruto sebesar -1.148401. Hasil tersebut tidak sejalan dengan hipotesis yang menduga bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB.

Pada Teori Pertumbuhan Endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditentukan oleh faktor-faktor internal seperti akumulasi modal, kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta efisiensi alokasi sumber daya. Pemerintah memiliki peran penting melalui kebijakan fiskal, termasuk transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), yang secara teoritis seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi apabila digunakan secara produktif. Pada temuan empiris terlihat bahwa DAK justru menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap PDRB. Fenomena tersebut dapat menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah melalui DAK belum sepenuhnya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan dalam Teori Pertumbuhan Endogen. Pengelolaan DAK perlu lebih efektif, efisien, dan produktif agar dana tersebut mampu meningkatkan kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan PDRB daerah (Seran et al., 2025).

Berdasarkan Teori Pembangunan Islam Ibnu Khaldun menjelaskan pembangunan ekonomi dilihat dari efektifitas penggunaan dana dalam menciptakan aktivitas ekonomi produktif. Apabila pengeluaran pemerintah

tidak mampu menciptakan produktivitas ekonomi yang tepat sasaran, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan lemah bahkan menghambat perkembangan ekonomi. Penggunaan DAK yang terlalu fokus pada proyek-proyek tertentu dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mendanai sektor yang memiliki dampak ekonomi lebih cepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya transfer dana tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila pengelolaannya belum mampu mendorong aktivitas produktif masyarakat (Aryanti, 2018). Pemanfaatan DAK belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan *hifz al-mal*. Pada konsep Maqashid Syariah, harta yang dimiliki pemerintah merupakan amanah yang harus digunakan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat. Apabila pelaksanaan DAK terdapat ketidaksesuaian program, rendahnya tingkat penyerapan anggaran, dan proyek kurang produktif, maka dana yang tersedia belum mampu menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Hasil temuan penelitian mencerminkan bahwa pengelolaan dana publik belum sepenuhnya memenuhi prinsip *hifz al-mal* dalam optimalisasi prinsip ekonomi (R. Anggraini et al., 2025).

Hasil temuan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luxsian & Marna (2024) menunjukan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto.” Hal ini berarti bahwa

peningkatan DAK justru diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata. Kondisi DAK mengindikasikan belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada kenyataannya DAK yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah juga dapat menyebabkan pemanfaatannya menjadi kurang efektif dalam meningkatkan output ekonomi.

Implikasi hasil penelitian menjelaskan bahwa peningkatan DAK belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar DAK yang diterima daerah, justru diikuti oleh penurunan atau melambatnya peningkatan PDRB. Hasil tersebut mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam pemanfaatan DAK untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif di daerah. Penggunaan DAK lebih banyak diarahkan pada pembiayaan sektor pelayanan publik yang manfaat ekonominya bersifat jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap peningkatan output ekonomi daerah belum langsung terlihat dalam periode penelitian 2021–2024. DAK lebih banyak digunakan untuk belanja yang tidak langsung mendukung sektor produktif, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah akan rendah bahkan dapat menurunkan efisiensi pembangunan.

4. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial mengindikasikan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif signifikan pada Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel Belanja

Modal senilai 0,0004 dimana nilai tersebut lebih kecil dibanding dengan nilai signifikansi 0,05. Variabel Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang ditunjukkan melalui besarnya koefisien determinasi pada variabel Belanja Modal senilai 0.819048 yang artinya setiap 1% kenaikan pada Belanja Modal dapat menaikkan Produk Domestik Regional Bruto senilai 0.819048. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, sejalan dengan hipotesis yang menduga bahwa Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah.

Pada Teori Pertumbuhan Endogen, pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, terutama Belanja Modal. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja Modal menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Belanja Modal pemerintah dipandang sebagai investasi produktif yang meningkatkan kapasitas produksi ekonomi secara permanen. Infrastruktur yang baik akan menurunkan biaya transaksi, meningkatkan konektivitas antarwilayah. Kondisi ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor swasta, yang pada akhirnya meningkatkan output ekonomi (PDRB). Pengeluaran pemerintah dimasukkan langsung ke dalam fungsi produksi sebagai faktor input, artinya semakin besar belanja pemerintah yang produktif seperti Belanja Modal, maka semakin tinggi tingkat output yang dihasilkan. Hal ini menjelaskan Belanja Modal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Haryati et al., 2025).

Hasil penelitian dapat dijelaskan melalui Teori Pembangunan Islam Ibnu Khaldun bahwa Pembangunan ekonomi terjadi ketika pemerintah mampu menciptakan infrastruktur dan lingkungan yang mendukung produksi, perdagangan, dan investasi masyarakat. Belanja Modal yang diwujudkan dalam Pembangunan aset publik berfungsi meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi sehingga mendorong pertumbuhan output regional (Aryanti, 2018). Pengalokasian anggaran pada Belanja Modal merupakan implementasi dari prinsip *hifz al-mal* karena harta publik tidak hanya dijaga, namun dikembangkan melalui investasi yang memberikan manfaat ekonomi jangka Panjang. Penggunaan APBD untuk pembangunan infrastruktur lebih sesuai dengan prinsip *hifz al-mal* dibandingkan pengeluaran yang bersifat konsumtif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak generasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan Belanja Modal mampu meningkatkan kapasitas produksi daerah dan memperbesar nilai tambah ekonomi yang tercermin dalam kenaikan PDRB (Murni et al., 2025).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurmayanti et al. (2021) yang membahas mengenai “Pengaruh PAD, Jumlah Penduduk, Jumlah Investasi, dan Jumlah Pencari Kerja terhadap PDRB Kabupaten Kuningan” memiliki hasil yang sejalan dengan analisis yang dilakukan yaitu bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ama & Renggo, (2022) dengan judul “Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap PDRB Kabupaten Di Pulau Sumba Tahun 2015 –

2020” hasil yang diperoleh bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB di Pulau Sumba.

Implikasi hasil penelitian menjelaskan bahwa Belanja Modal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata. Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah melalui pengadaan aset tetap dan infrastruktur publik telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja Modal menjadi instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pasar, irigasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan mampu memperlancar meningkatkan aksesibilitas antarwilayah yang mendukung kegiatan produksi dan perdagangan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan menciptakan efisiensi ekonomi sehingga aktivitas ekonomi daerah meningkat dan berdampak pada kenaikan PDRB.

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Hasil analisis Uji F menunjukkan bahwa F-statistik senilai 733,8920 dan prob (F-statistik) nilainya 0,00000 dibawah signifikansi 0,05 sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Produk Doemstik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024. Terlihat juga pada Tabel 3.10 hasil uji koefisien determinasi menghasilkan nilai Adjust R-squaresd senilai 0.995034 artinya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal dapat menjelaskan variabel Produk Domestik

Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah diangka 99,5%, adapun bagian yang tersisa dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Nilai Adjusted R-squared menunjukkan nilai yang sangat tinggi, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah. Sektor pemerintah merupakan salah satu kontributor utama dalam pembentukan PDRB, baik secara langsung melalui belanja pemerintah maupun secara tidak langsung melalui stimulasi sektor swasta. Pola pergerakan yang sama antara DAU, DAK, PAD, Belanja Modal, dan PDRB dalam periode 2021–2024, yang menunjukkan masa pemulihan pasca pandemi, pemerintah meningkatkan belanja dan transfer ke daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Hal ini mengakibatkan DAU, DAK, PAD, Belanja Modal, dan PDRB cenderung meningkat secara bersamaan. Kondisi tersebut secara statistik menghasilkan hubungan yang sangat kuat.

Teori Pembangunan Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu wilayah merupakan hasil dari hubungan yang saling mendukung antara pemerintah, kekayaan negara, pembangunan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan kemakmuran melalui pembangunan yang produktif. Teori Pembangunan Ibnu Khaldun yang menempatkan pemerintah dan pengelolaan keuangan publik sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada Maqashid Syariah dalam prinsip *hifz al-mal* menjelaskan bahwa PAD, DAU, dan DAK dapat dipandang sebagai bagian

dari harta publik yang menjadi amanah bagi pemerintah daerah untuk digunakan demi kemaslahatan umum. Belanja Modal sebagai bentuk pemanfaatan harta publik yang bertujuan menciptakan aset produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, *hifz al-mal* mengajarkan bahwa harta tidak boleh dibiarkan menganggur atau digunakan secara tidak efektif, namun harus dikembangkan untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan (Ramzani P et al., 2020).

Implikasi kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah secara efektif dan produktif. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan. Dana transfer dari pemerintah pusat menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas publik, pendidikan, dan kesehatan. Belanja Modal yang dialokasikan pemerintah daerah turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong produktivitas masyarakat dan meningkatkan kegiatan usaha sehingga berdampak pada peningkatan PDRB. Peningkatan PDRB tidak dapat dilepaskan dari peran kebijakan fiskal daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

6. Hubungan Antara Produk Domestik Regional Bruto dengan Kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kemiskinan di Jawa Tengah periode 2021–2024 dengan koefisien korelasi sebesar $-0,0724$. Pada Tabel 3.2 kriteria tingkat kekuatan korelasi, hasil koefisien korelasi masuk dalam kategori sangat lemah karena hasil mendekati 0. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, namun hubungan tersebut tidak kuat dan memiliki kontribusi yang sangat kecil. PDRB mencerminkan total nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Ketika PDRB meningkat terjadi ekspansi aktivitas ekonomi, sehingga kesempatan kerja terbuka lebih luas dan pendapatan masyarakat memiliki peluang untuk meningkat. PDRB sering dicerminkan sebagai pertumbuhan ekonomi yang seringkali diiringi dengan perbaikan teknologi, infrastruktur, dan efisiensi produksi. Produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan kenaikan upah riil sehingga dapat memperbaiki daya beli masyarakat miskin (Yansuri et al., 2025).

Teori Pertumbuhan Endogen Menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan investasi pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat. Jika peningkatan PDRB tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, dan pemerataan kesempatan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan efektif dalam menurunkan kemiskinan secara signifikan (Rizal, 2015). Teori Pembangunan Islam Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan

ekonomi, namun juga dari terciptanya keadilan, pemerataan distribusi kekayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh distribusi manfaat yang merata cenderung tidak mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu identik dengan penurunan kemiskinan apabila tidak disertai pemerataan hasil pembangunan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* yang menekankan perlindungan harta, pengelolaan, dan distribusi kekayaan secara adil agar memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Hasil penelitian lemahnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi di Jawa Tengah belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin, sehingga tujuan pembangunan Islam yang menekankan kesejahteraan, pemerataan, dan pengurangan kesenjangan sosial belum tercapai secara optimal (Ibrahim & Mawardi, 2025).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan & Bahjatulloh (2022) menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan negatif dengan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya efektif menurunkan kemiskinan bila distribusi pendapatan relatif stabil. Hasil temuan analisis diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Miftahussalam & Rofiuddin (2021) menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, namun tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB belum mampu memberikan dampak yang kuat terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari &

Novianti (2024) menemukan bahwa PDRB memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, namun pengaruh tersebut relatif kecil dan tidak dominan dalam menjelaskan variasi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan literatur yang mengkaji hubungan kausal (pengaruh) dalam menjelaskan hubungan antara kedua variabel, meskipun penelitian terdahulu berfokus pada hubungan kausal (*causality*), hasil estimasi yang diperoleh tetap merepresentasikan adanya hubungan statistik (korelasi) antara PDRB dan kemiskinan.

Implikasi hasil penelitian menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya bersifat inklusif. Peningkatan PDRB kemungkinan lebih banyak didorong oleh sektor-sektor tertentu yang manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, sementara masyarakat berpendapatan rendah masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. Program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan kebijakan yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin, sehingga dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan akan cenderung tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah tahun 2021-2024 menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah tahun 2021-2024, hal ini dikarenakan pada penelitian ini peningkatan PAD belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata, disebabkan oleh kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif lebih kecil dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi daerah menjadi tidak signifikan karena masih didominasi oleh sumber pendanaan lain.
2. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah tahun 2021-2024, hal ini disebabkan oleh DAU sebagai dana transfer terbesar dari pemerintah pusat, hal ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan PDRB.
3. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah tahun 2021-2024, hal ini dikarenakan alokasi Dana Alokasi Khusus yang lebih banyak diarahkan pada

sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang dampaknya tidak langsung meningkatkan nilai tambah ekonomi. Pengalokasian dana pada sektor pelayanan memberikan dampak yang lebih bersifat jangka Panjang, sehingga Dana Alokasi Khusus belum menunjukkan dampak signifikan dalam jangka pendek.

4. Belanja Modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah tahun 2021-2024, dikarenakan Belanja Modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
5. Secara simultan DAU, DAK, PAD, dan Belanja Modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2021-2024, dibuktikan dari besaran pada prob(F-statistik) senilai 0,00000 yang lebih rendah dari nilai signifikansi 0,05, dan keempat variabel independent tersebut dianggap dapat menjelaskan variabel PDRB sebesar 99,5%.
6. Produk Domestik Regional Bruto memiliki korelasi yang lemah dan mengarah negatif dengan kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2021-2024, dikarenakan pemulihan ekonomi pasca pandemi memingkatkan PDRB yang belum merata, dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat pengangguran masih tinggi membuat peningkatan PDRB tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal sehingga peningkatan pendapatan tidak sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan, dan masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil dan interpretasi penelitian, diantaranya:

1. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini relatif pendek sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh dalam jangka panjang.
2. Penggunaan data sekunder menyebabkan hasil penelitian sangat bergantung pada ketersediaan, kelengkapan, konsistensi, dan kualitas data yang dipublikasikan oleh kedua instansi tersebut.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi. Karakteristik fiskal dan kondisi perekonomian daerah yang berbeda di provinsi lain memungkinkan diperolehnya hasil yang tidak sama dengan temuan dalam penelitian ini.

C. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif di bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan terkait mekanisme pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah dan alokasi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta implikasinya terhadap penurunan kemiskinan. penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pengentasan

kemiskinan, khususnya pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian memberikan bukti empiris mengenai peran PDRB sebagai variabel yang menghubungkan kebijakan fiskal daerah dengan tingkat kemiskinan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah terkait dalam memahami hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap PDRB serta kaitannya dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Temuan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana instrumen fiskal daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat selama periode 2021–2024. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi empiris mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan maupun evaluasi dalam penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Syntax Idea*, 4(8.5.2017), 2003–2005.
- Afferina, D., Husein, R., Rahmah, M., & Murtala. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap PDRB Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jeru.v7i2.20876>
- Aisi, R., & Rosmanidar, E. (2026). Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Keuangan Publik Islam Di Bakeuda Kabupaten Tebo. *Jurnal Icons Islamic Economics Journal*, 3(1), 58–66.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal Of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100.
- Alvaro, R., & Wibowo, A. P. S. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2), 103–120. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i2.102>
- Ama, D. R. T., & Renggo, Y. R. (2022). Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap PDRB Kabupaten Di Pulau Sumba Tahun 2015 - 2020. *Transformatif*, 11(1), 30. <https://doi.org/10.58300/transformatif.v11i1.314>
- Anandari, A. A. (2022). Analisis Korelasi Sektor Pertanian Terhadap Persentase Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 20(1), 53–64.
- Ananta, R., & Kurniati, E. (2025). Analisis Kesesuaian Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Dengan Maqashid Syariah Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Revenue Pembangunan Ekonomi*, 08(01), 27–41.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Anggraini, R., Junaidi, & Kumaidi. (2025). Integrasi Maqasid Al-Shariah dan Good Governance dalam Manajemen Fiskal Syariah: Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 156–177. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/krigan/article/view/10239>
- Anggraini, W., Lampung, B., Lampung, B., & Lampung, B. (2026). *Pengaruh*

Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2014-2024. 08(01), 112–138.

- Aprizal, P., Nabilla, G. A., Ilahia, S. N. K., Ilmiah, E., Septiani, S. S., & Susanti, P. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Dana Alokasi Khusus Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah Dalam Sistem Keuangan Daerah.* 13(4), 306–312.
- Arivah, N., & Ikbal, M. (2025). *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun: Relevansinya Terhadap Teori Ekonomi Modern.* *Hamfara: Journal Of Islamic Economic Studies*, 1(4), 416–425.
- Aryanti, Y. (2018). *Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosioekonomi Dan Politik Ibn Khaldun'S Economic Thought; Socioeconomic and Political Dynamics Approach.* *Jurnal IMARA*, 2(2), 151–167.
- Aryu Inayati, A. (2013). *Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra.* *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 164–176. <http://www.google.com>
- Aziz, G. A., Rochaida, E., & Warsilan. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.* *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 12(1), 29–48. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Bahl, R., & Wallance, S. (2006). *Fiscal Decentralization And Fiscal Equalization Within Regions: The Case Of Russia.* *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 18(1), 27–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JPBAFM-18-01-2006-B002>
- Basuki, A. T. (2014). *Regresi Model PAM, ECM dan Data Panel dengan EVIEWS 7.* Katalog Dalam Terbitan (KDT). <https://ekonometrikblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/10/regresi-pam-ecm-dan-data-panel.pdf>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis.* Rajawali Pers.
- BPS. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2021-2024.* 1–603.
- BPS. (2024). *Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2025.* Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/S3pkSVdHdG1iVU50TXlzdINYY3pZVzFVV1haVIFUMdkjMw==/jumlah-kecamatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah--2025.html?year=2025>
- BPS. (2025). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2024.* Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVfQwWjVWeTISZDNabVFUMdkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi--2023.html?year=2024>

- Darise, R. I. (2024). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(12).
- Diva, S. (2025). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Daerah Terhadap PDRB di Provinsi Jambi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jambi*, 5(2), 76–83. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3186357%5C&val=28020%5C&title=Pengaruh Self Efficacy Dan Soft Skill Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Akhir Angkatan 2018 Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi Indonesia](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3186357%5C&val=28020%5C&title=Pengaruh%20Self%20Efficacy%20Dan%20Soft%20Skill%20Terhadap%20Kesiapan%20Kerja%20Mahasiswa%20Akhir%20Angkatan%202018%20Pendidikan%20Ekonomi%20Universitas%20Jambi%20Indonesia)
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gulo, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, November*, 25–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.36378/prosidinguniks.v0i0.2713>
- Hadya, R., Begawati, N., & Yusra, I. (2017). Analisis Efektivitas Pengendalian Biaya, Perputaran Modal Kerja, dan Rentabilitas Ekonomi Menggunakan Regresi Data Panel. *Jurnal Pundi*, 1(3).
- Hakim, H., Abdullah, M. F., & Boedirochminarni, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja dan PAD Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(4), 88–104.
- Haryati, D. C., Nurpiji, Masitoh, G., Saputra, W., & Subarkah, T. (2025). Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia : Pendekatan Data Panel. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 139–153. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2185>
- Hatmaka, H. M. (2024). Pajak dan Pendapatan Asli Daerah: Evaluasi Kesesuaian dengan Prinsip Maqasid Syariah. In *Journal of Ecotourism and Rural Planning* (Issue 1). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jerp>
- Hermawan, A. A., & Bahjatulloh, Q. M. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Zakat sebagai Variabel Moderasi di Indonesia Tahun 2016-2020. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–16. <http://blog.iain-tulungagung.ac.id/labfebi/wp-content/uploads/sites/114/2020/02/DEWI.pdf>
- Hertanto, I., & Sriyana, J. (2011). Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 12(1), 76–89. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1273>

- Hidayat, F., Widianita, R., & Miftahurrahmah. (2022). Peran Pemasukan Daerah terhadap Belanja Modal dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(2), 51–68.
- Ibrahim, E. K., & Mawardi. (2025). Analisis Konsep Masalah Sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(2), 1–19. <https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/istikhlaf/article/view/871>
- Indartini, M., & Mutmainah. (2024). *Analisis Data Kuantitatif: Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Korelasi dan Regresi Linier Berganda*. Penerbit: Lakeisha.
- Islami, B. K., & Nababan, B. O. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor 2010-2016. *Jurismata*, 2(1), 2656–2692.
- Istiqamah, N., Arif, M., Maknun, M., Mapparenta, M., & Awaluddin, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep. *Center of Economic Students Journal*, 5(1), 50–56. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i1.86>
- Juwita, R., & Widia, A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Land Journal*, 3(1), 69–76. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1750>
- Kathir, I. (2000). *Tafsir Ibn Kathir (Abridged)*. Darussalam Publishers.
- Khaldun, I. (2011). *Mukaddimah Ibnu Khaldun Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri*. Pustaka Al-Kautsar.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Lestari, R. Y., Ridwan, M., & Batubara, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Langkat. 9(02), 2815–2825. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9681>
- Liana, W., Kusumastuti, S. Y., Hulu, D., Apriyanto, Judijanto, L., Wartono, T., Suharto, Fitriyana, Hariyono, & Milia, J. (2024). *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lulage, J., Walewangko, E. N., & Tolosang, K. D. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2010 – 2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(06), 229–240.

- Luxsian, M., & Marna, J. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019. *Jurnal Salingka Nagari*, 3(1), 66–72. <https://doi.org/10.24036/jsn.v3i1.184>
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 30660.
- Mahri, J. W., Cupian, Al Arif, M. N. R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarok, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi pembangunan islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Maisarah, M., & Anwar, K. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29103/jeru.v6i1.12267>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi Dan Keuangan Daerah*. CV.Andi Offset.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Keuangan Pemerintah Daerah. 5(2). <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Miftahussalam, M., & Rofiuddin, M. (2021). Pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1), 40–54. <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i1.63>
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perpektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.
- Murni, S., Qadrawi, M. H., & Ramadhan, R. (2025). Analisis Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 72–78. <https://jurnal.politeknikaceh.ac.id/index.php/jia/article/view/340>
- Murti, A. F. R., Tan, S., Magister, P., Ekonomi, I., Ekonomi, F., & Jambi, U. (2023). Pengaruh PAD , DAU , DAK , dan Belanja Modal terhadap PDRB Dan Hubungannya dengan Kemiskinan di Kota Jambi. 18(2), 12–31.
- Novianti, F., Riani, W., & Mafruhah, A. Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Jawa Barat tahun 2011-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 273–281. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.3235>
- Nurmayanti, H., Subechan, I., & Badriah, L. S. (2021). Pengaruh PAD, Jumlah

Penduduk, Jumlah Investasi, dan Jumlah Pencari Kerja terhadap PDRB Kabupaten Kuningan. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 193. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.266>

Pamungkasih, P. (2023). Penerapan Uji Korelasi Rank Spearman Untuk Mengetahui Hubungan Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Makanan Dan Tingkat Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Statistika Terapan*, 3.

BPK RI. (2005). PP No 55 Tahun tentang Dana Perimbangan. 09 Desember, LN. 2005 No. 137, TLN No. 4575 LL SETNEG: 32 HLM. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005%0Ahttps://peraturan.bpk.go.id/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005>

Priambodo, A. P., & Hidayat, N. W. (2024). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v8i1.2279>

Purba, B., Yolanda Putri br Hutasoit, H. F., & Ashari Siregar, I. (2024). Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pajak Daerah terhadap PDRB di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2458–2468. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.873>

Ramzani P, I., Yusuf, M. Y., & Furqani, H. (2020). Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Aceh (Ditinjau Dari Maqashid Syariah). *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 58–81. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.627>

Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Ekonomi Publik*. Pustaka Pelajar.

Rizal, R. N. (2015). Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(1), 15–30. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i1.02>

Romeo, E., Pasaribu, N., Ariani, N., & Id, E. A. (2023). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Belanja Modal, Dan Pengguna Internet Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pdrb Di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Of Development Economic and Digitalization*, 2(2), 105–123.

Saniah, R., & Murtala, M. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 6(3), 31. <https://doi.org/10.29103/jeru.v6i3.15182>

Santoso, A. (2020). Ipteks Perhitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.32400/jiam.4.1.2020.26921>

- Sari, E. P., & Novianti. (2024). Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Kalimantan Barat Tahun 2017-2022. *Ekodestinas: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Pariwisata*, 2(1), 36–56. <https://doi.org/10.59996/ekodestinas.v2i1.409>
- Septriani. (2023). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 884–894. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201>
- Seran, S. R., Gomes, P. M. S., Bria, J. I., & Piri, M. S. (2025). Peran Pemerintah Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection*, 8(3), 988–993.
- Sugiono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*. CV. Alfabeta.
- Suhardi, D. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Konomi Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 31–43. <https://doi.org/10.31850/economos.v1i2.574>
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Rajawali Pers.
- Suparlan, Pariastana, I. N., Akbar, M. F., Naufan, N. A., & Annisa, T. (2025). Analisis pengaruh BUMD, Dana Bagi Hasil (DBH) dan PAD terhadap PDRB di kabupaten kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2024. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 11(4), 318–324. <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i4.942>
- Tito Wardani, N., & Muchtolifah, M. (2022). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap produk domestik regional bruto di provinsi Jawa Timur. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 95–106. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i1.6707>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.
- Tri, D., & Joko, R. (2023). Hubungan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kalimantan Melalui Pendekatan Stochastic Frontier Analysis. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 35–50. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.476>
- Triani, Y., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 158. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.635>
- Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, BPK RI (2004).
- Wahyuningsih, S. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Daerah Pada Era

- Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur Tahun 2012-2016. *Digital Repository Universitas Jember*, 1–99. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/96045/SRIWAHYUNINGSIH-140810101144.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. *Junalku*.
- Wijaya, E., Suprayitno, D., Ladini, U., Nengsih, T. A., Sumiyarti, & Sudrimo, S. N. (2024). *Buku Ajar Ekonometrika*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wijayanti, N. K. H., & Darsana, I. B. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2013). *E-Jurnal EP Unud*, 4(9), 1164–1193. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/15512>
- Wulantari, R., & Meidy, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat 2003-2017. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1, 8–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.62>
- Yansuri, Yulianita, A., Ramadhan, A. T., & Firdianza, D. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi: Analisis Data Panel 2015 – 2024. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 2(4), 355–369. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/keat.v2i4.1972>
- Yustriawan, D. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5, 717–725. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609>
- Zahari, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1(1), 1319. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1759>
- Zaizafun, A. F., Wartoyo, & Djuwita, D. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 2(1), 56–65. <https://doi.org/10.70052/jeba.v2i1.280>
- Zuya, D. F., Aini, N., Br Nasution, M. P., Nabila, N. A., Harza, M. K., & Hayati, F. (2025). Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dalam Konteks Ekonomi Modern. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(1), 347–356. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5747>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syafira Julia Rizqy
NIM : 40122041
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
E-mail address : jj398119@gmail.com
No. Hp : 082325168554

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Hubungannya dengan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2021-2024

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026

(Syafira Julia Rizqy)